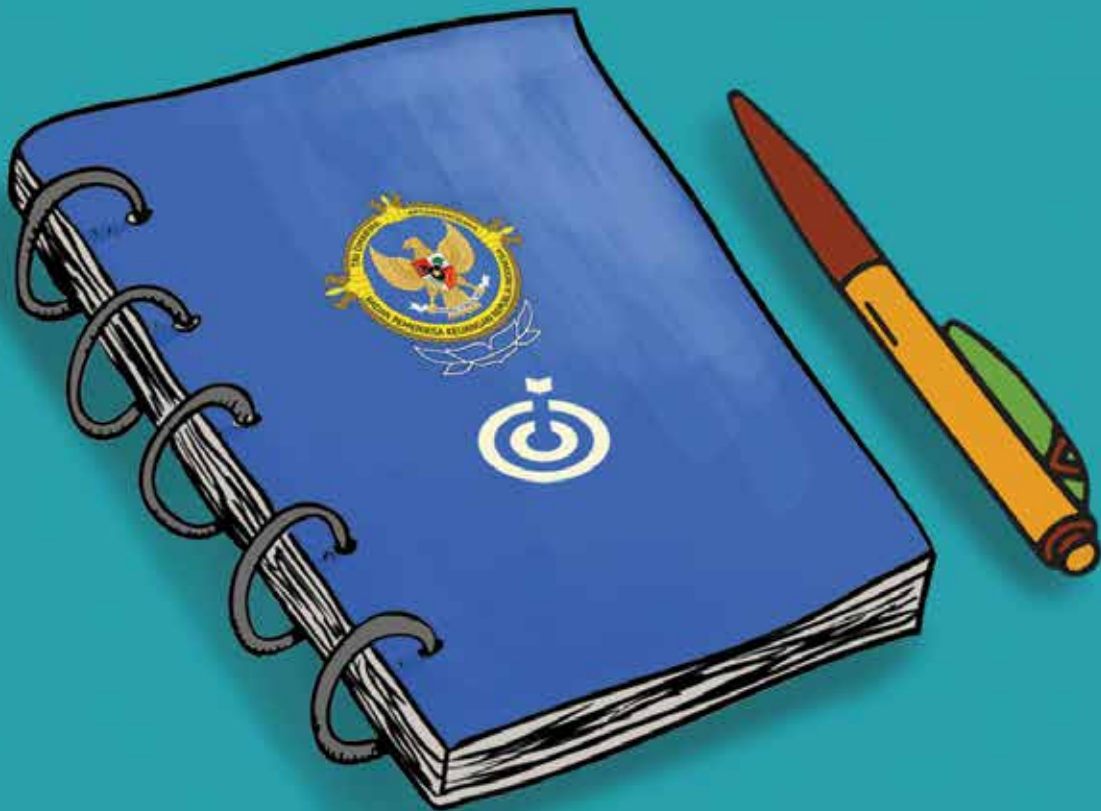




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MAJALAH WARTA PEMERIKSA
MARET 2024

wfp



KERJA KERAS MEWUJUDKAN BPK SEMAKIN BERKINERJA

Ketua BPK pun menekankan agar pemeriksaan yang terlibat
dalam pemeriksaan tematik harus bersinergi.

Rapat Koordinasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 menjadi salah satu isu utama *Warta Pemeriksa* edisi Maret 2024. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 25 Maret 2024 itu mengusung tema "Membangun Budaya Kerja untuk BPK Semakin Berkinerja".

Pemilihan tema ini sebagai harapan agar budaya kerja yang sudah dimiliki BPK dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan. Khususnya di tengah dinamika dan tantangan perkembangan lingkungan di era *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* (VUCA) serta disrupsi teknologi seperti saat ini.

Satu hal yang ditekankan dalam acara ini antara lain fokus mengenai kebijakan pemeriksaan SDGs. Disebutkan, pemeriksaan SDGs perlu dilanjutkan dengan lebih melibatkan BPK Perwakilan untuk mendukung konsep *localizing SDGs*. Ini karena banyak target SDGs berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah.

Hal lainnya adalah perlunya pemutakhiran dan perluasan data keuangan negara yang ada dalam BIDICS di seluruh level pemerintahan. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan lainnya. Harapannya, para pemeriksa dapat memanfaatkan BIDICS dalam setiap penugasannya.

Informasi lain yang redaksi siapkan yaitu mengenai sejumlah permasalahan terkait layanan impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai dan pabean terhadap tiga objek pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada semester I 2023.

Tiga objek pemeriksaan itu yakni pengelolaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) tahun 2021 dan 2022, pengelolaan cukai hasil tembakau tahun 2021 dan 2022, serta pengelolaan kepabeanan impor untuk dipakai tahun 2021 dan 2022. Pengelolaan cukai dan pabean dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 8 yakni penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya kegiatan prioritas (KP) reformasi fiskal.

Jangan lewatkan juga informasi untuk melihat cara ANAO menerapkan lingkungan kerja yang fleksibel bagi ibu pekerja. Masih terkait dengan itu, simak perjalanan Hadiana Makmur dalam menyelami semangat RA Kartini. Cerita Hadiana yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Sertifikasi dan Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan, terutama pegawai perempuan di BPK, dalam menjalani kariernya. Ini juga selaras dengan semangat RA Kartini yang dahulu memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk para pembaca dalam *Warta Pemeriksa* edisi kali ini. Selamat menikmati.

SOROTAN	4	KERJA KERAS MEWUJUDKAN BPK SEMAKIN BERKINERJA
	11	BPK DUKUNG PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCAPAIAN SDGs
BPK BEKERJA	18	MEMPERBAIKI LAYANAN IMPOR BARANG DI BEA CUKAI
	22	MENGAWAL PROYEK HILIRISASI SUMBER DAYA MINERAL ANTAM
SHARING KNOWLEDGE	27	MELIHAT CARA ANAO MENERAPKAN LINGKUNGAN KERJA FLEKSIBEL BAGI IBU PEKERJA
INTERNASIONAL	32	BPK LAKUKAN SUPERVISI PEMERIKSAAN KINERJA IMO
	34	BPK SAMPAIKAN REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN IPU
	36	BPK JADI PEMERIKSA EKSTERNAL CTI-CFF
SOSOK	38	HEDIANA MAKMUR, MENYELAMI SEMANGAT RA KARTINI
BPK PERWAKILAN	42	FAKTOR-FAKTOR LAMBATNYA PENANGANAN <i>Stunting</i> SULAWESI TENGGARA
SUDUT PANDANG	48	BELAJAR BUDAYA KERJA INOVATIF DARI GOOGLE
BEDAH BUKU	52	TINGKATKAN KUALITAS KARYA ILMIAH DENGAN BUKU PANDUAN TERBARU
KESEHATAN	56	HATI-HATI DENGAN SIFAT PEMBULI DALAM DIRI
KEPEGAWAIAN	58	GOTONG ROYONG MEMBANGUN YAYASAN CAKRA BHAKTI SANTOSA
TEKNOLOGI	61	MENGAUDIT PEMANFAATAN TEKNOLOGI
KILAS	66	BPK MINTA PEMERINTAH TERUS TINGKATKAN KUALITAS ALOKASI DAN PELAKSANAAN APBN
	68	PIMPIN <i>Entry Meeting</i> , ANGGOTA VI BPK TEKANKAN PENGUATAN KEUANGAN DAERAH
KOLOM	70	SIKAP MENTAL YANG HARUS DIMILIKI PEMERIKSA BPK DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERMANFAAT

Pengarah Isma Yatun, Hendra Susanto, Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, Pius Lustrilanang, Slamet Edy Purnomo, **Penanggung Jawab** Bahtiar Arif, **Wakil Penanggung Jawab** R. Yudi Ramdan Budiman, **Ketua Tim Redaksi** Sri Haryati, **Kepala Sekretariat** Bestantia Indraswati, **Sekretariat** Fitri Yuliantri Permana, Klara Ransingin, Ridha Sukma, Ratna Tri Darmayanti, Apriyana, Sudarman, **Alamat Sekretariat** Gedung BPK RI Jalan Gatot Subroto no 31, Jakarta, **Telepon** 021-25549000 Pesawat 1188/1187, **Email** wartapemeriksa@bpk.go.id
Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

bpk.go.id



Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.
 (Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Kerja Keras Mewujudkan BPK Semakin Berkinerja

► Pimpinan BPK RI membuka Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2024.



▲ Ketua BPK, Isma Yaton

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2024 pada Senin, 25 Maret 2024. Kegiatan itu mengusung tema "Membangun Budaya Kerja untuk BPK Semakin Berkinerja".

Ketua BPK Isma Yaton menyampaikan, pemilihan tema tersebut merupakan harapan agar budaya kerja yang sudah dimiliki BPK dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan di tengah dinamika dan tantangan perkembangan lingkungan di era *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* (VUCA) serta disrupsi teknologi.



"Sehingga, kinerja dan nilai tambah BPK bagi pencapaian tujuan nasional optimal," ungkap Isma dalam sambutannya.

Isma mengawali arahannya dengan memberikan apresiasi atas capaian seluruh pelaksana BPK pada 2023. Kinerja BPK tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian kinerja BPK *wide* sebesar 98,69 persen. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari capaian IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 98,93 persen dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan yang mencapai 100 persen.

Prestasi tersebut juga didukung hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) BPK Tahun 2023 sebesar 85,63 yang menempatkan BPK pada peringkat empat di antara seluruh Kementerian/Lembaga. Sederet prestasi lain juga berhasil ditorehkan BPK seperti Penghargaan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.

Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 99,85 dari Bappenas, Indeks Kematangan SPBE sebesar 3,63 dari Kementerian PANRB, yang tertinggi di antara Lembaga Tinggi Negara lainnya, serta Sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Isma menyampaikan, BPK berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Sehingga, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023 yang digelar pada semester I 2024, Isma meminta agar seluruh pelaksana BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

Setelah itu, pada semester II mendatang, BPK akan melaksanakan pemeriksaan tematik terkait Prioritas Nasional (PN) 6 yaitu "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim", pemeriksaan tematik lokal terkait penyusunan APBD dan pengelolaan infrastruktur ekonomi, serta pemeriksaan SDGs Tujuan 5 yakni "Kesetaraan Gender".

Terkait pemeriksaan tematik, Isma meminta agar dapat disepakati pemilihan area yang akan diperiksa, penentuan lingkup dan sampel pemeriksaan, alokasi SDM dan anggaran dari setiap satker yang terlibat, serta penyusunan *business case* pemeriksaannya. Selain itu, sejak tahap perencanaan pemeriksaan agar seluruh AKN yang terlibat mengidentifikasi kebutuhan data dan *sharing data* dengan AKN terkait melalui pemanfaatan BPK Big Data Analytics (BIDICS).

Pengelolaan pemeriksaan tematik juga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan *lesson learnt* pada tahun-tahun sebelumnya serta harus diarahkan pada topik/lingkup/sasaran yang menjadi perhatian publik dan dapat memberikan manfaat atau dampak signifikan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara. Isma pun menekankan agar pemeriksaan yang terlibat dalam pemeriksaan tematik harus bersinergi.

"Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional," ujar Isma.

Isma juga mengungkapkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka koordinasi kegiatan semester II 2024, penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, dan penyusunan Renstra BPK 2025-2029. Isma meminta agar kebijakan dan strategi pemeriksaan diprioritaskan

"Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional."

Ketua BPK, Isma Yatun

pada upaya pencapaian amanat konstitusi dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga, Isma menyampaikan, pemeriksaan perlu diarahkan pada isu strategis yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, jaminan sosial, fakir miskin dan anak terlantar, kebudayaan, dan perekonomian nasional. Selain itu, fokus pula pada cabang produksi yang dikuasai negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara, dan hubungan pusat dan daerah.

Pemeriksaan kinerja juga menjadi perhatian Isma. Hal ini karena pemerintah juga telah mulai menerapkan kebijakan penyusunan laporan keuangan (*unaudited*) yang dilampiri dengan laporan kinerja. Untuk itu, BPK perlu mulai mengembangkan metodologi untuk dapat melakukan pemeriksaan atas laporan kinerja (*performance statement*) pemerintah.

"Pemeriksaan tersebut penting agar BPK dapat memberikan keyakinan yang memadai apakah kinerja yang dilaporkan pemerintah telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, berguna, dan dapat diandalkan," ungkapnya.

Seiring dengan periode Renstra BPK 2025-2029 yang hampir bersamaan dengan akhir periode Agenda Implementasi SDGs 2030, Isma menekankan fokus mengenai kebijakan pemeriksaan SDGs. Menurutnya, pemeriksaan SDGs perlu dilanjutkan dengan lebih melibatkan BPK Perwakilan untuk mendukung konsep *localizing SDGs*. Ini karena banyak target SDGs berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah.

"BPK Perwakilan harus memiliki *awareness* dan pemahaman terhadap program maupun kegiatan terkait SDGs di entitas pemdanya masing-masing dan mengembangkan kapasitas untuk melakukan pemeriksaan SDGs," ujarnya.

Isu *stakeholder trust* terhadap BPK tak lepas dari sorotan Isma. Menurutnya, hal itu merupakan aspek fundamental agar hasil pemeriksaan BPK memberi manfaat dan dampak secara optimal.

Selanjutnya, Isma mendorong adanya peta jalan Keketuaan BPK di INTOSAI yang diintegrasikan dengan Renstra BPK 2025-2029 sekaligus mengembangkan

strategi internal dan eksternal untuk mensukseskan Keketuaan BPK di INTOSAI. Seperti diketahui, BPK telah terpilih sebagai Ketua INTOSAI untuk periode 2028 hingga 2031.

"Keketuaan BPK di INTOSAI merupakan kesempatan bagi BPK untuk ikut berperan aktif dalam upaya penguatan diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus upaya mencapai salah satu tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," ungkapnya.

Capaian kinerja BPK *Wide Tahun 2023* yang sebesar 98,69, menurut Isma, masih perlu ditingkatkan. Dia menyampaikan, masih terdapat beberapa indikator kinerja terkait pemeriksaan yang masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Isma juga meminta agar dilakukan pemutakhiran dan perluasan data keuangan negara yang ada dalam BIDICS di seluruh level pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan lainnya. Isma berharap agar para pemeriksa dapat memanfaatkan BIDICS dalam setiap penugasannya.



◀
Wakil Ketua BPK,
Hendra Susanto



▲ Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana



▲ Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Daniel Lumban Tobing

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di internal BPK. Hendra mendorong transformasi peran Itama sebagai *trusted advisor* untuk meningkatkan kapabilitas Itama ke IACM Level 4. Itama dan Ditama Renvaja pun dinilai perlu berkoordinasi dalam pengembangan governansi, risiko, dan pengendalian terintegrasi.

Hendra menyampaikan, manajemen mutu di level pemeriksaan juga perlu diperkuat dengan penguatan *quality control* dan *quality assurance* di setiap penugasan pemeriksaan. Hasil *Peer Review* Tahun 2024, ungkap Hendra, juga perlu dimanfaatkan untuk pengembangan berkelanjutan di BPK.

"Pengembangan berkelanjutan mengubah BPK dari *the sleeping elephant* menjadi *the dancing elephant* sehingga hasil kerja BPK memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara," ujarnya.

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyoroti pentingnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan rekomendasinya baru mencerminkan sebagian dari keberhasilan tugas BPK.

Rekomendasi BPK diharapkan dapat mencerminkan perubahan dan mendorong perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi entitas/objek yang diperiksa.

"Keberhasilan BPK yang paripurna diperoleh dari rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh entitas yang dipantau melalui SiPTL," ungkap Nyoman.

Kemudian, Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing mendorong analisis data mengenai keuangan negara. Daniel menyampaikan, analisis data dalam pemeriksaan perlu menjadi suatu budaya kerja.

Dia menyampaikan, kebiasaan dalam melakukan tugas pemeriksaan perlu selalu mengutamakan ketersediaan data sebelum mengambil kesimpulan pemeriksaan maupun mengusulkan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Dia pun meminta agar dilakukan evaluasi kemampuan pengolahan data, sinergi data, analisis data untuk pemeriksaan yang berkualitas, serta melengkapi hasil revidu dan pemeriksaan internal oleh Itama. Ditama Renvaja juga perlu merencanakan peningkatan kapasitas kelembagaan BPK dalam pengelolaan data keuangan negara, melalui dukungan data dari AKN I sampai AKN VII di BPK.



▲ Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Haerul Saleh

Sementara, Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh menegaskan pentingnya pemeriksaan program ketahanan pangan. Menurutnya, BPK perlu melakukan pemeriksaan komprehensif atas program ketahanan pangan, untuk merespons dan mengantisipasi krisis pangan dunia.

"Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang melibatkan peran multi *stakeholder* dari hulu hingga hilir meliputi area pemerintah pusat maupun daerah sehingga pemeriksaan harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif antar AKN," ungkap Haerul.

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit mendorong BPK agar dapat berperan memperbaiki



▲ Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Ahmadi Noor Supit

belanja pemerintah. Dia menyampaikan, pemerintah menghadapi tantangan dalam mengelola belanja berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara, pemda cenderung memperbesar struktur birokrasinya dengan cara menambah jumlah pegawai tanpa mempertimbangkan kondisi beban kerja yang ada.

Dia menyampaikan, temuan pemeriksaan Prioritas Nasional (PN) 2 yakni perencanaan dan pengelolaan *mandatory spending* di pemerintah daerah belum memadai untuk mendukung belanja yang berkualitas. Kemudian, temuan pemeriksaan LKPD Tahun 2022 yakni terdapat peningkatan utang daerah di beberapa wilayah yang digunakan untuk belanja infrastruktur karena adanya keterbatasan fiskal daerah.



◀
Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara VI BPK,
Pius Lustrilanang

▼
Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara VII BPK,
Slamet Edy Purnomo

"BPK perlu berperan dalam mendorong pemerintah untuk meningkatkan PAD dan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang menyampaikan pentingnya pemeriksaan bidang pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu yang disoroti adalah pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dia mengatakan, salah satu masalah aktual dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Indonesia adalah terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pemilu.

"Tantangan dalam menjaga keamanan dan integritas sistem elektronik serta pemilih data menjadi perhatian utama bagi kita semua. Selain itu, masalah terkait pelaksanaan pemungutan suara yang aman, efisien, dan transparan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo menyampaikan pentingnya pembahasan isu



crosscutting. Menurutnya, banyak permasalahan di tubuh BUMN yang terkait dengan kebijakan kementerian/lembaga maupun pemda. Hal ini kemudian menimbulkan inefisiensi keuangan negara, kehilangan aset, maupun beban keuangan/kerugian bagi BUMN.

"Masalah *crosscutting* dengan entitas AKN lain kurang dikomunikasikan sehingga entitas kesulitan dalam menyelesaikan temuan karena menyangkut wewenang K/L lain atau terdapat potensi rekomendasi pemeriksaan yang bertentangan dari 2 LHP berbeda. Oleh karena itu, perlu peningkatan koordinasi antar-AKN," tegas Slamet.

BPK Dukung Peran Perguruan Tinggi dalam Pencapaian SDGs



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yaton memaparkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isma menekankan, hal itu juga menjadi titik penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sehingga, diperlukan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Menurutnya, akselerasi pencapaian target SDGs Indonesia merupakan *cornerstone* untuk RPJPN 2025-2045 yang lebih terarah dan terukur.

"Saya bicara SDGs karena salah satu targetnya adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas atau *equality of education* di setiap tingkatan hingga tercipta *life long learning*. Itu adalah kunci tercapainya tujuan SDGs lainnya," ungkap Isma dalam Kuliah Umum Ketua BPK RI di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, 8 Maret 2024.



Isma menjelaskan, ketika masyarakat mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan mencapai kesetaraan gender, menumbuhkan toleransi antar-manusia, melindungi bumi, sekaligus memberdayakan masyarakat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs dilakukan melalui pengarusutamaan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Sementara, kontribusi perguruan tinggi salah satunya diwujudkan dengan pembentukan SDGs Center yang tersebar di seluruh Indonesia.

Keberadaannya memiliki peran penting dalam membantu pemerintah pusat dan daerah untuk penyusunan pelaksanaan dan pemantauan evaluasi hingga pelaporan rencana aksi SDGs di Indonesia.

"Untuk itu, saya sangat mengapresiasi Universitas Andalas yang telah memiliki Center for Human and SDGs sejak 2018," ujarnya.



Isma mengatakan, institusi pendidikan tinggi seperti Unand memiliki posisi strategis dan unik sekaligus sentral untuk menjadi yang terdepan dalam mendukung pencapaian SDGs menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menekankan, tujuan SDGs nomor 4 mengarahkan akses yang setara terhadap pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang unggul, adaptif, dan kolaboratif.

Selain itu, perguruan tinggi juga berperan dalam membangun masyarakat berkelanjutan yakni sebagai pendorong pencapaian seluruh SDGs melalui perannya dalam pembentukan SDM sekaligus penghasil pengetahuan dan inovasi.

"Para mahasiswa sebagai potensi SDM bangsa yang unggul adalah *changemakers* di masa depan. Maka sudah saatnya Universitas Andalas dan perguruan tinggi lainnya bertransformasi dan bersinergi untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang mampu mencetak generasi muda yang berkompeten, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan sehingga Indonesia Emas 2045 dapat direalisasikan," ungkap Isma.

Salah satu tantangan yang perlu dijawab oleh perguruan tinggi adalah mengoptimalkan *output* atau hasil dari pendidikan tinggi tersebut. Unand dan perguruan tinggi lainnya dinilai perlu bisa menyesuaikan dengan potensi generasi milenial dan generasi Z.

Kelompok tersebut kini mengisi komposisi mayoritas mahasiswa. Mereka adalah *digital native generation* sehingga memiliki kesadaran dan komitmen lebih tinggi untuk mendorong dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

"Implementasi tri dharma perguruan tinggi yang mempertimbangkan karakteristik generasi milenial dan gen Z adalah kunci tercapainya target SDGs sekaligus Indonesia Emas 2045," ungkap Isma.

Isma mengatakan, adaptasi dengan karakter *digital native generation* di bidang pendidikan dan pengajaran bisa dilakukan dengan mengintegrasikan SDGs dalam program studi, kurikulum, dan mata kuliah serta mengadakan seminar dan *workshop* sehingga mahasiswa memahami konsep dan target untuk berkomitmen menjadi *agent of change* dalam SDGs.

Di bidang penelitian dan pengembangan, yakni dengan melakukan penelitian yang dapat menghasilkan solusi inovatif serta berkolaborasi dengan pemerintah, industri, dan organisasi non pemerintah.

Dalam pengabdian masyarakat juga dapat dilakukan dengan membantu masyarakat dalam mencapai target SDGs. Isma menyampaikan, Unand telah melakukan pengabdian masyarakat untuk mencapai target SDGs melalui Program Kampung Iklim, Program KKN, dan Program WASH di Kampung Adat Sijunjung.

Peran penting perguruan tinggi tersebut pun sejalan dengan komitmen BPK dalam implementasi SDGs. Isma menjelaskan, BPK merupakan institusi sentral dalam menjaga sistem akuntabilitas negara yang merupakan aspek krusial dalam pencapaian SDGs dan rencana pembangunan nasional.

"BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui kewenangan pemeriksaannya berkomitmen untuk mengawal agenda pembangunan nasional, mengidentifikasi kendala yang dapat mengganggu pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan program maupun kegiatan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," kata Isma.



"Implementasi tri dharma perguruan tinggi yang mempertimbangkan karakteristik generasi milenial dan gen Z adalah kunci tercapainya target SDGs sekaligus Indonesia Emas 2045."

Ketua BPK, Isma Yatun



Isma menyampaikan, pada 2018, BPK menjadi salah satu SAI pertama di dunia yang melakukan pemeriksaan atas kesiapan pemerintah dalam implementasi SDGs. Melalui pemeriksaan itu, BPK telah memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk menguatkan mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin keberlangsungan program dan kegiatan implementasi SDGs.

BPK juga telah melakukan sejumlah pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah terkait SDGs. BPK pun hadir dan berkontribusi dalam berbagai inisiatif dan kegiatan terkait SDGs. Hal itu seperti BPK menyampaikan pengalamannya dalam melakukan revidi terhadap penyusunan *voluntary national report* (VNR) Indonesia tahun 2021 di forum UN High Level Political Forum (HLPF).

"BPK juga terlibat dalam beberapa kelompok kerja atau *working group* INTOSAI yang terkait dengan SDGs," ujar Isma.

Isma mengatakan, perguruan tinggi sebagai pencetak generasi bangsa yang berintegritas juga harus membenahi kerangka akuntabilitas dan transparansinya. Dalam beberapa pemeriksaan yang dilaksanakan BPK terkait perguruan tinggi, masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sisi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.

Peran perguruan tinggi juga bisa semakin diperkuat dalam pencapaian SDGs melalui kolaborasi dengan BPK.





"Kami di BPK selalu melibatkan ahli dari perguruan tinggi dalam kegiatan pemeriksaan BPK di antaranya untuk melakukan pengujian atas objek tertentu," ujarnya.

Hasil riset atau kajian akademisi juga dapat digunakan terutama pada pemeriksaan kinerja. Perguruan tinggi dapat mengintegrasikan laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi studi kasus untuk dibahas dan didiskusikan sehingga rekomendasi akan lebih kaya dan berdampak luas.

Dalam kuliah umum yang turut dihadiri oleh para calon wisudawan dan wisudawati Unand tersebut, Isma mengingatkan tanggung jawab dalam mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan maju. Hal itu diperlukan guna menyongsong tahun 2045 saat usia kemerdekaan tepat mencapai 100 tahun.

"Anda semua, para mahasiswa dan calon wisudawan Universitas Andalas adalah generasi emas yang akan memimpin Indonesia menuju kejayaannya di tahun 2045 kelak," ungkap Isma.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id

Memperbaiki Layanan Impor Barang di Bea Cukai



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait layanan impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai dan pabean terhadap tiga objek pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada semester I 2023.

Tiga objek pemeriksaan itu yakni pengelolaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) tahun 2021 dan 2022, pengelolaan cukai hasil tembakau tahun 2021 dan 2022, serta pengelolaan kepabeanan impor untuk dipakai tahun 2021 dan 2022. Pengelolaan cukai dan pabean dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 8 yakni penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya kegiatan prioritas (KP) reformasi fiskal.



Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-8, khususnya target 8.1 yakni mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta TPB ke-16, khususnya target 16.6 yakni mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK pada tiga objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan cukai dan pabean telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya aplikasi IT Inventory pada

perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB), pusat logistik berikat (PLB), gudang berikat (GB), dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) tidak memadai atau tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Perdirjen BC Nomor PER09/BC/2014. BPK mengungkap, IT Inventory tidak digunakan secara kontinu dan *real time*, serta tidak memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang, tidak terintegrasi dengan sistem pembukuan perusahaan, dan tidak dapat diakses secara *online* oleh DJBC. Selain itu, CCTV pada perusahaan penerima fasilitas KB dan PLB tidak dapat diakses dan tidak dapat dilakukan *playback*. Hal ini mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk menginstruksikan Direktur Fasilitas Kepabeanan supaya memerintahkan kepada seluruh perusahaan penerima fasilitas terkait untuk mengembangkan sistem IT Inventory yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

BPK juga mencatat, pelaksanaan monitoring atas fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE belum optimal. BPK menyampaikan, monitoring umum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)/ Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) belum dilaksanakan secara periodik minimal satu bulan sekali. Laporan monitoring umum pada beberapa KPPBC atas IT Inventory juga belum menggambarkan kondisi yang senyatanya, bahwa kondisi IT Inventory yang sebenarnya bermasalah. DJBC juga belum memiliki *database* yang terintegrasi atas hasil monitoring umum, monitoring khusus, evaluasi mikro, dan hasil audit serta tindak lanjutnya.

Hal ini mengakibatkan Kanwil DJBC dan KPPBC terkait tidak dapat melakukan monitoring tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi nontagihan dan berisiko tidak tepat dalam mengambil keputusan pemberian fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE kepada perusahaan atas hasil monitoring umum yang tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Kanwil DJBC terkait dan Kepala KPPBC terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya supaya lebih optimal mengawasi dan

"Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-8, khususnya target 8.1 yakni mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta TPB ke-16, khususnya target 16.6 yakni mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat."

mengendalikan kinerja bawahannya dalam melaksanakan monitoring sesuai dengan ketentuan tata laksana dan monitoring fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE.

Temuan BPK selanjutnya yakni proses validasi atas pemberitahuan pabean impor (PPI) dalam aplikasi Customs Excise Information System and Automation (CEISA) belum dapat menjamin akurasi data impor. Hal itu disebabkan nilai pabean pada pemberitahuan pabean atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke kawasan bebas/*free trade zone* (FTZ) tertulis tidak wajar dan tidak benar. Kemudian, aplikasi CEISA tidak memvalidasi secara akurat atas nomor identitas importir dalam pemberitahuan impor barang (PIB), sehingga terdapat penggunaan nomor identitas lebih dari satu untuk importir yang merupakan kedutaan besar, perwakilan negara sahabat dan lembaga internasional,



BEACUKAI.CO.ID

serta terdapat penggunaan dua NPWP oleh satu importir. Ada pula urutan nomor barang pada PIB tidak lengkap dan/atau tidak berurutan serta terdapat nomor barang yang dicatat dengan penomoran "0" atau berulang.

Hal ini mengakibatkan adanya peluang data impor tidak akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, serta berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai antara lain untuk menginstruksikan Direktur Fasilitas Kepabeanan berkoordinasi dengan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai supaya meningkatkan proses validasi atas nilai pabean pada PPFTZ di CEISA FTZ *piloting existing* dan nomor identitas kedutaan besar atau perwakilan negara sahabat dan lembaga internasional pada PIB di Aplikasi CEISA. Selain itu, perlu ada pembinaan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Direktur Teknis Kepabeanan, dan selanjutnya supaya lebih optimal melakukan evaluasi atas Aplikasi CEISA untuk memastikan bahwa proses validasi sudah dapat menjamin akurasi data impor.

Dalam pemeriksaan, BPK turut mengungkap pelaksanaan pengambilan foto barang dalam pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF) belum didukung pengendalian yang memadai, seperti ketentuan yang

mengatur standar pengambilan foto pemeriksaan fisik barang belum ada. Selain itu, terdapat indikasi penggunaan *file* foto yang teridentifikasi sama pada lebih dari satu laporan hasil pemeriksaan fisik barang atas 4.178 PIB dan PPFTZ. Hal ini mengakibatkan adanya risiko kesalahan analisis foto oleh pejabat pemeriksa dokumen, tim penelitian ulang, tim audit, dan aparat pengawas fungsional yang dapat berdampak pada kesalahan dalam menetapkan tarif dan/atau nilai pabean serta dalam mengambil keputusan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai antara lain untuk mengatur standar pengambilan foto pemeriksaan fisik barang, serta menginstruksikan Direktur Kepatuhan Internal dan kepala kantor pabean terkait untuk berkoordinasi dalam melakukan pendalaman atas duplikasi file foto terkait pemeriksaan fisik barang dan selanjutnya memberikan pembinaan kepada PPF terkait atas ketidakcermatannya supaya lebih cermat dalam mengambil dan mengunggah foto hasil pemeriksaan fisik barang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai dan pabean pada DJBC Kementerian Keuangan mengungkapkan 32 temuan yang memuat 46 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 40 kelemahan SPI dan 6 ketidakpatuhan sebesar Rp 184,48 juta.

Mengawal Proyek Hilirisasi Sumber Daya Mineral Antam



DOK ANTAM.COM

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebelas anak perusahaan dan entitas afiliasi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami ketidakefisienan biaya operasi minimal sebesar Rp16,67 miliar pada periode 2019 hingga 2021. Hal itu disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Tahun 2019 sampai 2021 pada PT Aneka Tambang Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Holding, kini menjadi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kesesuaian pengelolaan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral tahun 2019 sampai 2021 pada Antam dan *holding* BUMN tambang, MIND ID terhadap peraturan yang berlaku.

Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat Antam dan MIND ID mengelola peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan melakukan usaha di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian serta optimalisasi pemanfaatan sumber yang dimiliki untuk mendapat keuntungan. Sehingga, Antam berhasil mencapai penjualan emas tertinggi di tahun 2022 yaitu 34,97 ton. Hal ini mencapai 125 persen target penjualan tahun 2022 dan tumbuh 19 persen dari penjualan emas tahun 2021.



"BPK mencatat Antam dan MIND ID mengelola peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan melakukan usaha di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian serta optimalisasi pemanfaatan sumber yang dimiliki untuk mendapat keuntungan. Sehingga, Antam berhasil mencapai penjualan emas tertinggi di tahun 2022 yaitu 34,97 ton. Hal ini mencapai 125 persen target penjualan tahun 2022 dan tumbuh 19 persen dari penjualan emas tahun 2021."

Capaian penjualan tahun 2022 mencapai Rp45,93 triliun atau tumbuh 19 persen dari penjualan tahun 2021. Laba bersih tahun 2022 mencapai Rp3.82 triliun atau tumbuh 105 persen dari capaian tahun 2021.

Antam juga berhasil mendapatkan penghargaan tiga Proper Hijau dan empat Proper Biru karena telah melakukan pengelolaan lingkungan yang baik.

Kendati demikian, BPK mengungkap sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian. Hal itu yakni, dalam pelaksanaan penambangan mineral, Antam belum detail merumuskan langkah strategi peningkatan kinerja anak usaha, cucu usaha, dan perusahaan afiliasi serta penciptaan value untuk MIND ID.

BPK menyatakan, sebelas anak perusahaan dan entitas afiliasi Antam di antaranya mengalami ketidakefisienan biaya operasi minimal senilai Rp16,67 miliar pada periode 2019-2021.

Hal tersebut disebabkan oleh direksi Antam belum secara proaktif berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan direksi MIND ID untuk memastikan kejelasan revidu kinerja sepuluh perusahaan *operating subsidiary* dan delapan perusahaan *non-operating subsidiary* di bawah Antam termasuk opsi strategi untuk menciptakan *value* bagi MIND ID.

Direksi Antam belum memiliki kajian menyeluruh sebagai dasar pembuatan *road map* untuk menentukan langkah detail strategi dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh anak, cucu, dan perusahaan afiliasi serta menciptakan *value* bagi MIND ID.

BPK pun merekomendasikan kepada direksi Antam agar berkonsultasi dan/atau berkoordinasi secara proaktif dengan direksi MIND ID untuk memastikan kejelasan revidu kinerja sepuluh perusahaan *operating subsidiary* dan delapan perusahaan *non-operating subsidiary* di bawah Antam termasuk opsi strategi untuk menciptakan *value* bagi MIND ID.



Selain itu, direksi Antam juga perlu memerintahkan Subsidiaries Management Division Head bersama unit terkait lainnya untuk membuat kajian menyeluruh sebagai dasar pembuatan *road map* yang antara lain memuat langkah detail strategi dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh anak, cucu, dan perusahaan afiliasi serta menciptakan *value* bagi MIND ID, antara lain dengan mempertimbangkan opsi divestasi, penyederhanaan organisasi, atau menjadikan cucu usaha sebagai unit atau proyek pada perusahaan induk.

Temuan selanjutnya, dalam pengolahan dan pemurnian mineral, Antam dinilai tidak optimal mengelola risiko Proyek Feronikel Halmahera Timur dalam rangka mendukung program peningkatan nilai tambah sumber daya mineral. Sesuai dengan Pasal 102 UU Nomor 4 Tahun 2009, Antam sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.

Antam salah satunya melaksanakan pembangunan smelter feronikel di Halmahera Timur sejak tahun 2016 dan ditargetkan selesai tahun 2019. Sampai dengan saat ini, proyek pembangunan smelter tersebut belum selesai dan belum beroperasi. Antam pun berpotensi menanggung *cost overrun* minimal sebesar Rp97,38 miliar dan risiko penurunan nilai (*impairment*) aset minimal senilai Rp111,24 miliar.

Hal tersebut disebabkan oleh direksi Antam belum menyusun *contingency plan* terkait proyek smelter Feronikel Halmahera Timur dan *integrated risk assessment* untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Antam (P3LA) dan Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pendukung (P2FIP), serta belum optimal melaksanakan langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan terkait proyek smelter Feronikel Halmahera Timur.

BPK merekomendasikan kepada direksi Antam agar menyusun *contingency plan* terkait proyek smelter Feronikel Halmahera Timur dan *integrated risk assessment* untuk P3LA dan P2FIP serta menyelesaikan pembangunan proyek smelter hingga dapat berproduksi.

Antam juga perlu melaksanakan secara optimal langkah riil antara lain untuk memitigasi *cost overrun* dan menyelesaikan permasalahan terkait P3LA dengan konsorsium BGP-DEP dan terkait Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH) dengan WIKA melalui pembayaran klaim sebesar Rp213 miliar.



FOTO-FOTO: DOK ANTAM.COM



Dalam pemanfaatan mineral, BPK turut mengungkap Antam tidak optimal mengelola risiko tidak tercapainya target pelaksanaan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral bauksit melalui pembangunan Proyek Smelter Grade Alumina Refinery dan West Kalimantan Mine Development. Antam kehilangan pendapatan penjualan bauksit sebesar 13,56 juta dolar AS pada tahun 2021 dan akan terus berlanjut sampai beroperasi smelter tersebut.

BPK memberikan rekomendasi kepada direksi Antam agar bersama dengan pemegang saham lainnya, sesuai porsi kewenangannya, memerintahkan Direktur Utama PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) untuk mengevaluasi progres proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) secara komprehensif dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut menyusun strategi serta langkah-langkah detail untuk mengatasi permasalahan keterlambatan proyek SGAR. Selain itu, mengevaluasi kecukupan asuransi sesuai klausul kontrak dan mendorong pemenuhannya untuk melindungi proyek SGAR.

Direksi Antam juga perlu mengevaluasi progres proyek West Kalimantan Mine Development (WKMD) secara komprehensif dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut menyusun strategi serta langkah-langkah detail untuk mengatasi permasalahan keterlambatan proyek WKMD.



BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

BPK RI Official



wartapemeriksa.bpk.go.id



▲
Kania Inawesnia

Melihat Cara ANAO Menerapkan Lingkungan Kerja Fleksibel bagi Ibu Pekerja

Kesetaraan gender tidak melulu memberikan aturan istimewa bagi para pekerja perempuan khususnya para ibu yang bekerja. Lingkungan kerja yang fleksibel dengan dibantu aturan-aturan yang mengakomodasi kebutuhan, ternyata amat membantu bagi para ibu yang bekerja.

Hal ini diungkapkan pemeriksa BPK Kania Inawesnia yang pernah menjalani *secondment program* di Australian National Audit Office (ANAO). Kania menyebut pendekatan yang diambil ANAO menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua pegawai, khususnya bagi pegawai wanita.

Ia menyebut prinsip kesetaraan gender tanpa memperkenalkan aturan atau kebijakan khusus yang ditujukan untuk pegawai wanita. Mereka percaya bahwa kesetaraan seharusnya tidak memihak satu gender, melainkan mendorong semua pegawai untuk meraih potensi maksimal mereka tanpa hambatan gender. Pendekatan ini menunjukkan bahwa di ANAO, kesetaraan gender bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja yang terinternalisasi.

"Di ANAO itu tidak terdapat aturan atau kebijakan yang khusus ditujukan untuk pegawai wanita, bahkan ketika saya tanya ke para *senior female leaders* ini menjawab kalau mereka sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, sehingga buat apa ada peraturan khusus untuk wanita, malah kesannya jadi memprioritaskan salah satu gender, seperti itu. Jadi tidak terdapat aturan atau kebijakan yang dikhususkan untuk pegawai Wanita," ucap Kania dalam KTF bertajuk "Highlights from the Women with Children Secondment Program", 28 Maret 2024.

Meski tidak ada perlakuan khusus, akan tetapi menurut dia, poin kedua yang membantu para ibu bekerja adalah lingkungan kerja yang fleksibel. Ia menyebut tanpa ada perlakuan khusus, ANAO dan para petinggi di dalamnya menerapkan kebijakan fleksibel sehingga mendukung pegawai wanita untuk bisa bekerja dengan optimal.

Secara garis besar, ungkap dia, dengan pengaturan kerja yang lebih fleksibel, termasuk bekerja dari jarak jauh dan pengaturan jam kerja yang berbeda, ANAO mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individu, terutama bagi para ibu yang bekerja.

Selain itu, hal lainnya adalah kebijakan cuti yang beragam dan luwes. Ia menyebut di



ANAO dan lembaga lainnya di Australia kebijakan cuti diatur berdasarkan Fair Work Act tahun 2009. Kebijakan cuti ini karena jenis cutinya yang sangat beragam dan juga fasilitas yang diberikan sangat mendukung para Perempuan khususnya ibu bekerja.

Poin berikutnya adalah budaya positif yang dicontohkan para pimpinan. Para pimpinannya sangat menikmati dan menghargai fleksibilitas para pekerja. "Jadi pimpinan atau *senior leader* yang ada di ANAO ini itu mereka sangat menikmati *working environment* ini. Salah satunya seperti, budaya mereka itu kalau setelah bekerja, para pegawai sangat jarang ditanyakan soal pekerjaan," tutur dia.

Karena pimpinannya sudah mencontohkan demikian, maka di bawahnya pun mengikuti pola seperti itu. Jadi pekerja sangat tenang meninggalkan kantor setiap harinya tanpa khawatir pada malam hari dikejar-kejar pekerjaan dari atasan. Sehingga membuat bekerja di Australia atau di ANAO itu nyaman khususnya untuk perempuan dan ibu-ibu bekerja.

Masih terkait atasan, ia merasakan pimpinan sangat mendukung kinerja



FREEPIK

bawahan. Beberapa kali ia bertukar pendapat dan mengobrol dengan para *senior leader*, dimana mereka menceritakan pengalaman bekerja selama di level staf sampai dengan posisi mereka sekarang di level tertinggi.

"Salah satu contohnya ada salah satu senior manager wanita, dia bilang saya harus *resign* karena saya tidak bisa datang setiap hari ke kantor karena dia bekerja *interstate*. Dia bekerja di Melbourne, sedangkan kantor ANAO di Canberra. Malah atasannya bilang, oh kamu tidak usah *resign*, apasih yang bisa dibantu biar kamu biar tetap *stay*," tutur dia.

Alasannya selain karena kebiasaan yang ditanamkan pendahulunya juga pimpinan

menghargai kinerja karyawan. Dari sinilah lahir lingkungan kerja yang fleksibel.

Lalu, apa saja lingkungan kerja yang fleksibel, hal itu antara lain lewat tipe karyawan *full time* dan *part time*. Bahkan ada juga yang nanti bekerja tidak harus ke kantor dalam setahun cukup secara daring.

"Jadi intinya *flexible working arrangement* ini adalah memberikan kita kesempatan bekerja di luar standar jam, di luar pola pekerjaan yang rutin, yaitu bekerja di kantor ANAO di Canberra, kemudian bekerja 7,5 jam sehari Senin-Jumat," ucap dia.

Hanya saja memang untuk pegawai yang tidak bisa datang *full time* ke kantor, maka membutuhkan surat tertulis atau surat resmi dari kantor bahwa dia akan bekerja secara daring.

Di dalam negosiasi itu nanti terdapat syarat-syarat bentuk bekerja yang seperti apa yang akan dilakukan oleh pegawai tersebut. Aturan-aturan ini semuanya diatur dalam *Fair Work Act* tahun 2009.

"Di ANAO itu tidak terdapat aturan atau kebijakan yang khusus ditujukan untuk pegawai wanita, bahkan ketika saya tanya ke para *senior female leaders* ini menjawab kalau mereka sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, sehingga buat apa ada peraturan khusus untuk wanita, malah kesannya jadi memprioritaskan salah satu gender, seperti itu. Jadi tidak terdapat aturan atau kebijakan yang dikhususkan untuk pegawai Wanita."

"Bahkan meski sudah bekerja lagi setelah meninggalkan pekerjaan selama setahun, para ibu masih bisa mengambil fleksibilitas *working arrangements*."

Ia menyebut ada beberapa aturan yang bisa membuat seseorang mendapatkan izin kerja fleksibel seperti mengasuh anak, menjaga orang yang sudah tua, memiliki keluarga disabilitas, para disabilitas itu sendiri, berusia di atas 50 tahun atau lebih tua, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan beberapa hal lainnya.

"Kemudian alasan-alasan yang lain itu meliputi kebutuhan untuk belajar misalnya kita ambil sekolah lagi, itu kita bisa *request* untuk tidak bekerja seminggu penuh. Kemudian misalnya kita punya *supporting interest*, kemudian kita memilih *better work life balance*, kemudian transisi menuju masa pensiun, ada *health issues* kemudian juga kalau ada kita mau berpartisipasi ke *voluntary work* itu masuk ke alasan yang *reasonable* untuk dimintakan *flexible working arrangement*," tutur dia.



MACROVECTOR-FREEPIK

Pada intinya, menurut dia, kebijakan ini tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan *reasonable break* dari pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat memberikan kinerja terbaik. Jadi pada saat mereka kembali bekerja itu mereka sudah minim stres dan bisa kembali bekerja dengan lebih baik.

Contoh dan jenisnya itu di antaranya ada *annual leave, personal leave, leave without pay, long service leave, maternity and parental leave, leave for supporting partner, public holidays, study leave*, dan lainnya.

Kebijakan relevan di Indonesia

Ia menyebut setelah menjalani pekerjaan atau bekerja di ANAO, ada kebijakan yang menurutnya relevan untuk ditiru di Indonesia, seperti *maternity and parental leave*. Untuk mendapatkan cuti ini, pegawai ini harus sudah 12 bulan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian durasi cuti beragam hingga 52 minggu atau 1 tahun. Dengan pada 15 minggu pertama adalah cuti dibayar dan 37 minggu setelahnya tanpa digaji.

Menurut dia, kebijakan ini sangat tepat bagi ibu yang baru punya bayi, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengurus bayi. "Bahkan meski sudah bekerja lagi setelah meninggalkan pekerjaan selama setahun, para ibu masih bisa mengambil fleksibilitas *working arrangements*," tutur dia.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN
Senin-Jumat

07.30
-
15.30

**TERBUKA
UNTUK UMUM**

Koleksi produk-produk BPK yang tidak dijumpai di perpustakaan lain



Gedung BPK RI lantai 2
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat

**Desain
Ruangan
Menarik**



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://www.x.com/bpkri)



08111907010



[BPK RI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpkri](https://www.tiktok.com/@bpkri)



wartapemeriksa.bpk.go.id

BPK Lakukan Supervisi Pemeriksaan Kinerja IMO



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kinerja atas Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization atau IMO) tahun 2023. Supervisi ini dilakukan langsung oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto yang bertemu dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez di kantor pusat IMO di London, Inggris, Rabu (6/3/2024).

Supervisi pemeriksaan dilakukan atas pemeriksaan kinerja dengan area kunci pemeriksaan adalah manajemen proyek jangka panjang di IMO. Tujuan pemeriksaan yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas praktik manajemen proyek jangka panjang. Penekanannya yakni khusus kepada proses perencanaan dan pemantauan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada negara anggota IMO.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua menyampaikan apresiasi kepada pihak manajemen yang telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian *feedback* atas dampak pemeriksaan kinerja yang dilakukan, topik dan cakupan pemeriksaan kinerja tahun ini, serta keterlibatan negara anggota untuk memperkuat *stakeholder engagement*.



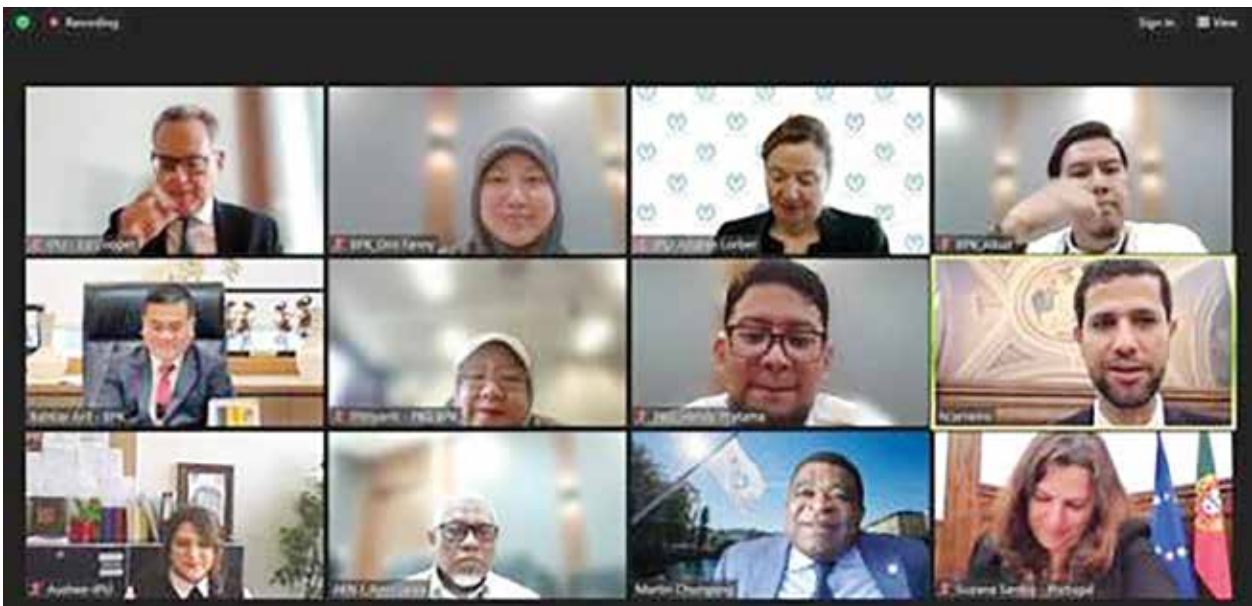
"Supervisi pemeriksaan dilakukan atas pemeriksaan kinerja dengan area kunci pemeriksaan adalah manajemen proyek jangka panjang di IMO. Tujuan pemeriksaan yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas praktik manajemen proyek jangka panjang."

Sekretaris Jenderal IMO mengapresiasi pemeriksaan yang dilakukan dan meyakini bahwa rekomendasi pemeriksaan kinerja dapat memberikan dampak positif pada perbaikan tata kelola organisasi di IMO. Khususnya terhadap manajemen proyek jangka panjang di IMO.

Dia juga turut mengapresiasi komunikasi yang terjalin antara tim pemeriksa dan manajemen IMO. Khususnya dengan Technical Cooperation and Implementation Division selaku *focal point* dalam pemeriksaan kinerja IMO pada tahun ini.

Kedatangan Wakil Ketua BPK ini merupakan pertemuan pertama kali semenjak Sekretaris Jenderal IMO terpilih, Arsenio Dominguez, secara resmi menjabat pada 1 Januari 2024.

BPK Sampaikan Rekomendasi untuk Perbaiki Tata Kelola Keuangan IPU



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada organisasi internasional Persatuan Antar Parlemen atau Inter Parliamentary Union (IPU). Rekomendasi ini disampaikan untuk perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan IPU.

Mulai dari mereviu strategi pembiayaan dana pensiun, meningkatkan kontrol internal dan klasifikasi penggunaan akun dalam pelaporan keuangan, serta mereviu strategi untuk meningkatkan kolektabilitas iuran anggota. Rekomendasi disampaikan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong dan internal auditor IPU Hugo Carneiro secara daring, Rabu (13/3/2024).

"Selain rekomendasi, Sekretaris Jenderal BPK selaku *auditor in charge* pemeriksaan laporan keuangan IPU tahun 2023 juga menyampaikan poin-poin hasil pemeriksaan kepada manajemen IPU dan internal auditor IPU."



Selain rekomendasi, Sekretaris Jenderal BPK selaku *auditor in charge* pemeriksaan laporan keuangan IPU tahun 2023 juga menyampaikan poin-poin hasil pemeriksaan kepada manajemen IPU dan internal auditor IPU.

Pertemuan ini dilakukan dalam rangkaian penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan IPU tahun 2023. Pertemuan dilaksanakan setelah BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan IPU tahun 2023 secara daring kepada sekretaris jenderal IPU pada 8 Maret 2023.

Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal dan jajaran manajemen IPU menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas profesionalitas dan kerja sama dari tim pemeriksa IPU. Menurutnya, pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK memberikan nuansa yang berbeda bagi IPU.

Salah satu poin yang berkesan untuk IPU adalah BPK dapat memberikan pandangan yang lebih luas atas pengelolaan keuangan IPU. Menutup pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal IPU menegaskan kembali bahwa IPU menerima seluruh rekomendasi BPK dan berkomitmen akan menyelesaikan rekomendasi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, internal auditor IPU juga menyampaikan apresiasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah disusun secara jelas. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari *governing bodies* IPU.



BPK Jadi Pemeriksa Eksternal CTI-CFF

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal organisasi upaya kawasan segitiga terumbu karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan atau Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF). BPK menjadi pemeriksa eksternal untuk periode keuangan yang dimulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

Penunjukan tersebut berdasarkan keputusan dari CTI-CFF Regional Secretariat dan persetujuan dari Council of Senior Officers (CSO) CTI-CFF Chair. Surat penunjukan tersebut disampaikan kepada Ketua BPK Isma Yatun oleh Executive Director CTI-CFF Frank Keith Griffin pada Kamis (21/3/2024).

CTI-CFF adalah organisasi internasional yang menjadi wadah kemitraan multilateral dari enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Lembaga ini bekerja untuk menjaga sumber daya laut dan pesisir dengan mengatasi isu-isu penting. Mulai dari keamanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. Saat ini, kantor sekretariat regional CTI-CFF berada di Manado, Indonesia.

CTI-CFF memiliki tujuan untuk melindungi sumber daya biologis laut dan pesisir di wilayah negara anggota. Kemudian berupaya mengatasi pengurangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi, keamanan pangan, mata pencaharian berkelanjutan bagi komunitas pesisir.

Lembaga ini juga menjaga konservasi keanekaragaman hayati melalui perlindungan spesies, habitat, dan ekosistem. Tujuan tersebut dicapai dengan mengadopsi dan melaksanakan rencana aksi regional oleh masing-masing negara anggota.

Rencana aksi regional tersebut antara lain memperkuat pengelolaan lanskap laut; mempromosikan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan; mendirikan dan meningkatkan pengelolaan

efektif kawasan lindung laut; meningkatkan ketahanan komunitas pesisir terhadap perubahan iklim; dan melindungi spesies yang terancam punah. Melalui CTI-CFF, para negara anggota juga bersepakat untuk menerapkan konservasi keanekaragaman hayati yang berpusat kepada manusia, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan pembagian manfaat yang adil.

"CTI-CFF memiliki tujuan untuk melindungi sumber daya biologis laut dan pesisir di wilayah negara anggota. Kemudian berupaya mengatasi pengurangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi, keamanan pangan, mata pencaharian berkelanjutan bagi komunitas pesisir."

BPK mengajukan proposal pencalonan sebagai kandidat pemeriksa eksternal CTI-CFF pada 27 Desember 2023. Pengajuan proposal dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman BPK sebagai pemeriksa eksternal beberapa organisasi internasional saat ini dan sebelumnya.

Apalagi, BPK juga dipercaya menjadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB atau Chair of UN Panel of External Auditors (2022-2023) dan Ketua Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa (INTOSAI) 2028-2031. Sebelumnya, BPK menjadi Wakil Ketua INTOSAI periode 2025-2028.

BPK akan segera menjalankan mandat menjadi pemeriksa eksternal CTI-CFF menggantikan pemeriksa eksternal sebelumnya, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Hal ini diharapkan juga semakin meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BPK serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPK.

Menyelami Semangat RA Kartini



Seorang perempuan harus berani bersaing, berjuang, dan terus meningkatkan kemampuan diri agar semakin berperan di berbagai sektor. Pesan ini disampaikan istri Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Hedianna Makmur, yang telah berkarier di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 1999.

Hedianna yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Sertifikasi dan Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mengatakan, perempuan perlu terus menyelami semangat dan meneruskan perjuangan RA Kartini. Berkat RA Kartini yang dahulu memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan gender, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkarier, menempuh pendidikan, hingga dalam membangun bangsa dan negara.

Sosok RA Kartini yang berani membuat perubahan dan optimistis, menjadi inspirasi bagi Hedianna dalam menjalani kariernya selama mengabdikan diri di BPK. Kesuksesan yang diraih Hedianna saat ini tidak dilalui dengan mudah. Ada begitu banyak tantangan yang dilalui Hedianna. Namun, Hedianna mampu mengubah tantangan itu menjadi peluang dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.

Ada salah satu kisah yang masih diingat betul oleh Hedianna saat dahulu dirinya melakukan pemeriksaan di suatu daerah. Kala itu, ia menjalani tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik di suatu lokasi.

Jarak ke lokasi pemeriksaan fisik penuh dengan tantangan. Selain terpencil, juga harus melewati medan yang tak mudah. Jaraknya pun terbilang jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Akan tetapi, hal tersebut tak menyurutkan semangat Hedianna. Hedianna justru semakin tertantang untuk melakukan cek fisik.

"Walau jaraknya jauh dan medan yang sulit, itu justru menjadi pelecut semangat. Akhirnya saya bersama pihak entitas jalan ke lokasi cek fisik. Mereka pun tidak menyangka saya yang seorang ibu-ibu, ternyata kuat dan berani untuk jalan ke lokasi cek fisik," kata Hediana saat menceritakan pengalamannya saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* pada pertengahan Maret.

Cerita Hediana tersebut bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan, terutama pegawai perempuan di BPK, dalam menjalani kariernya. Ini juga selaras dengan semangat RA Kartini yang dahulu memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.

Ia juga berharap Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, dapat menjadi momentum bagi kaum perempuan untuk terus berperan, baik di dunia kerja maupun bagi keluarga.

"Meskipun sekarang isu kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki bukan menjadi masalah lagi, namun tidak dapat

dimungkiri bahwa dalam dunia kerja kadang kala masih ada cibiran untuk kaum perempuan. Tapi kalau bagi saya pribadi, semakin orang membedakan kaum perempuan, semakin saya tertantang. Kita tunjukkan bahwa kita bisa dan bahkan dapat lebih baik daripada laki-laki."

Oleh karena itu, Hediana kembali berpesan kepada kaum perempuan di BPK untuk meningkatkan kemampuan diri. Apalagi, BPK tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki dalam pengembangan karier.

"Di BPK, untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, juga tidak dibedakan. Sepanjang seseorang itu memiliki kompetensi yang baik dan berprestasi, dia dapat dipromosikan. Hal ini dapat dilihat juga dari Ketua Tim pemeriksaan di BPK juga banyak yang berasal dari kaum perempuan," ucap Hediana.

Menjadi cahaya bagi keluarga

Hediana juga mengingatkan kaum perempuan, khususnya seorang ibu, untuk terus menjadi cahaya bagi keluarga. Sesibuk apapun atau setinggi apapun jabatan di kantor, seorang perempuan harus tetap menjadi ibu rumah tangga saat di rumah.

Menurut Hediana, perilaku seorang istri sangat menentukan apa yang akan suami lakukan. "Kalau kita terlalu banyak menuntut, suami kita yang tadinya lurus, bisa saja melenceng gara-gara tuntutan kita. Tapi kalau kita selalu mengingatkan suami, insya Allah suami kita juga akan menjadi seseorang yang baik," kata Hediana.

"Meskipun sekarang isu kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki bukan menjadi masalah lagi, namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam dunia kerja kadang kala masih ada cibiran untuk kaum perempuan. Tapi kalau bagi saya pribadi, semakin orang membedakan kaum perempuan, semakin saya tertantang. Kita tunjukkan bahwa kita bisa dan bahkan dapat lebih baik daripada laki-laki."

Hediana Makmur



Ia lantas mencontohkan perannya sebagai istri dari Wakil Ketua BPK. Hediana mengatakan, insan di BPK mungkin tidak ada yang berani mengoreksi kesalahan atau kekurangan Wakil Ketua BPK karena ada rasa segan.

"Mana ada yang berani bilang 'bapak salah'. Jelek saja mungkin dibilang bagus. Artinya, orang mungkin tidak bisa menilai secara murni atau jujur. Tapi kalau istrinya tentu bisa obyektif. Jadi, kalau misalnya ada yang kurang, tentu saya ingatkan."

Sebagai seorang wanita karier, istri, dan seorang ibu, Hediana memiliki kiat untuk terus menjaga menjaga keharmonisan rumah tangga, Hediana dan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto selalu berupaya menyempatkan waktu bersama keluarga di akhir pekan.

"Kami usahakan Sabtu atau Minggu makan malam bersama. Entah sekedar ngobrol atau yang lainnya. Tidak harus pergi keluar. Saya dan Bapak memang merasa lebih nyaman di rumah, dibandingkan pergi keluar. Terkadang kami juga memasak bareng," kata Hediana.

Intinya, ujar Hediana, seorang ibu harus bisa membangun *quality time* bersama keluarga. "Jadi, seorang perempuan selalu berusaha menjadi cahaya bagi keluarga. Jelek dan baiknya rumah tangga tergantung dari seorang ibu dan tergantung dari seorang istri."

"Kalau kita terlalu banyak menuntut, suami kita yang tadinya lurus, bisa saja melenceng gara-gara tuntutan kita. Tapi kalau kita selalu mengingatkan suami, insya Allah suami kita juga akan menjadi seseorang yang baik."

Hediana Makmur



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



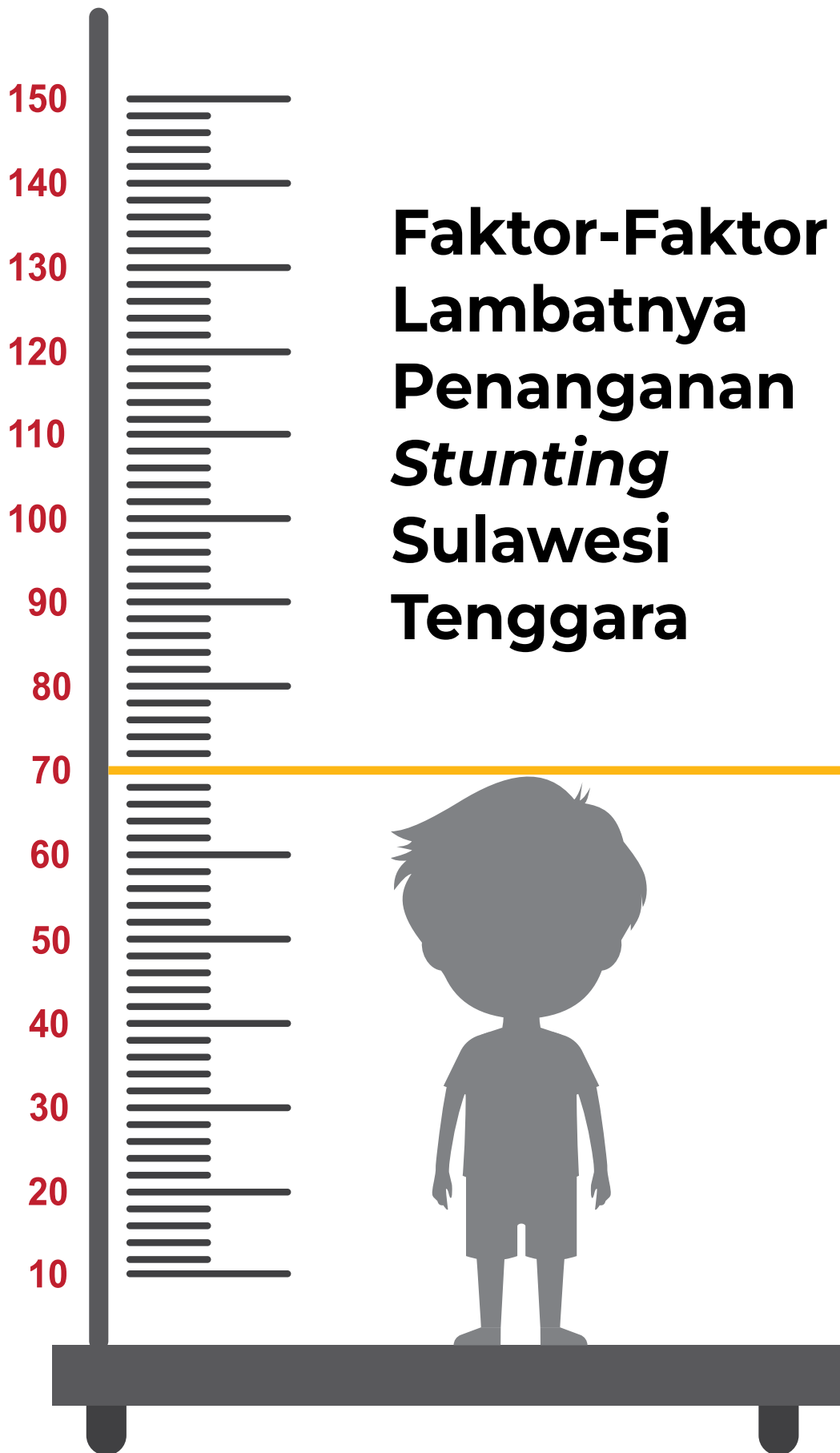
@humasbpkri.official



@bpk.ri



wartapemeriksa.bpk.go.id



➤ **AM Zdavir Sapada,**
Pemeriksa Ahli Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegagalan kebijakan pembangunan kadang (atau bahkan seringkali) diakibatkan oleh sasaran pembangunan yang keliru (walau telah menetapkan tujuan yang benar, sasaran sebagai indikator pencapaian tujuan seringkali keliru). Hal ini terjadi akibat orientasi pembangunan yang hanya “mengejar” angka pertumbuhan (*growth-oriented development*) dan gagal melihat tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu manusia. Walhasil, hal ini membuat para pengampu (dalam hal ini pemerintah) harus memutar haluan dengan menumpukan pertumbuhan berbasis manusia (*human-oriented development*). Hal ini bukannya menegaskan peran pertumbuhan ekonomi itu sendiri, namun, dengan menekankan dimensi manusia pada pembangunan, ia seakan-akan hendak mengembalikan arah tujuan pembangunan pada manusia dan kesejahteraannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berbasis manusia, maka tentu kualitas hidup manusia juga perlu diperhatikan. Hal ini, juga selaras dan beririsan dengan sejumlah tujuan *Sustainable Development Goals* (khususnya poin “Tanpa Kemiskinan,” “Tanpa Kelaparan,” serta “Kehidupan sehat dan sejahtera”). Namun demikian, kemajuan tersebut terancam akibat tingginya peristiwa *stunting* pada bayi lima tahun (balita) pada tahun 2010 yang mencapai 35,6 persen (Riskesdas: 2013). Hal ini berpotensi menjadi ancaman dan menghambat kemajuan ekonomi mengingat balita merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di waktu yang akan datang sehingga patut menjadi perhatian untuk segera ditangani. Maka, peralihan dasar pembangunan dari basis ekonomi ke dimensi manusia juga diperlukan dan perlu dilakukan dengan menangani angka *stunting* demi menyelamatkan SDM Indonesia, menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan (Penanganan) *Stunting* di Indonesia

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan sehingga berpotensi menghambat dan mengganggu tumbuh-kembang anak baik secara fisik dan kognitif (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan UNICEF). Peristiwa *stunting* ini disebut-sebut berpotensi terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak, yang jika gagal ditangani, dapat mengganggu potensi SDM Indonesia.

Dalam perjalanannya, tampaknya, penanganan *stunting* memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan pada skala nasional. Hal ini terlihat dari menurunnya angka *stunting* yang pada tahun 2018 mencapai 30,8 persen menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 (Survei Status Gizi Indonesia/SSGI: 2022). Penurunan sebesar 9,2 persen poin ini mungkin dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil yang pada tahun 2018 bertumbuh 5,17 persen dan pada tahun 2022 bertumbuh 5,53 persen (BPS). Karena besarnya perhatian pemerintah terhadap *stunting* melalui hadirnya berbagai program, tak heran, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) juga turut mengevaluasi program tersebut melalui laporan pemeriksaan.

Namun demikian, sayangnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) belum mampu mengikuti kinerja yang pesat dari berbagai provinsi lainnya. Hal ini terlihat dari data yang disajikan SSGI, dimana jumlah *stunting* di Sultra yang pada tahun 2018 mencapai 28,7 persen, hanya menurun 1 persen poin pada tahun 2022 menjadi 27,7 persen (op.cit). Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan membuat peringkat *stunting* Sultra melonjak dari peringkat 22 pada tahun 2018 menjadi peringkat 9 tertinggi nasional pada tahun 2022. Lebih jauh, kinerja pemerintah daerah dan komitmen terhadap penurunan angka *stunting* patut dipertanyakan, mengingat hanya terjadi penurunan sebesar 1 persen poin dalam lima tahun terakhir.

Indikator *Stunting* dan Faktor-Faktor Perkembangan *Stunting*

Untuk menangani hal ini, karenanya, diperlukan pemetaan terkait akar masalah mengapa Prov. Sultra tak kunjung mampu mengimbangi kinerja *stunting* provinsi lain. Dalam menjelaskan kinerja *stunting* Provinsi Sulawesi Tenggara, Laporan Indeks Khusus Penanganan *Stunting*/IKPS (BPS: 2021) mungkin dapat memberikan *insight* terkait akar masalah tersebut. Laporan IKPS menyajikan data terkait bagaimana kemajuan penanganan *stunting* yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah provinsi.

IKPS sendiri merupakan indeks gabungan (*composite index*) yang terdiri dari sejumlah indeks: Indeks Kesehatan, Indeks Gizi, Indeks Perumahan, Indeks Pangan, Indeks Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Lebih mendalam lagi, masing-masing indeks ini juga terdiri dari sejumlah indikator (istilah yang digunakan Kemenkes adalah dimensi). Indikator Kesehatan misalnya, terdiri dari indikator imunisasi, penolong persalinan oleh nakes di faskes, dan KB modern; indikator perlindungan sosial terdiri dari Kepemilikan JKN/Jaminan Kesehatan Nasional dan Penerima KPS/Kartu Perlindungan Sosial.

Dalam laporan ini, disebutkan bahwa IKPS Sultra hanya meningkat 3,9 persen dari tahun 2018 ke tahun 2021, dibanding peningkatan yang dialami seluruh provinsi lainnya sebesar 7,69 persen pada rentang tahun yang sama. Lambatnya kinerja IKPS Provinsi Sultra ini mungkin dapat menjelaskan akan rendahnya kinerja *stunting* Sultra. Jika ditilik secara lebih mendalam, terjadi penurunan tajam pada dua indikator di Sulawesi Tenggara yang mungkin menjadi penghambat atas kemajuan penanganan *stunting*, dua indikator tersebut adalah “Ketidakcukupan konsumsi pangan” (menurun sebesar 6,8 persen) dan “Penerima KPS” (menurun 26,5 persen poin).

"Jika ditilik secara lebih mendalam, terjadi penurunan tajam pada dua indikator di Sulawesi Tenggara yang mungkin menjadi penghambat atas kemajuan penanganan *stunting*, dua indikator tersebut adalah "Ketidakcukupan konsumsi pangan" (menurun sebesar 6,8 persen) dan "Penerima KPS" (menurun 26,5 persen poin)."

Dalam penjelasannya, Indeks "Ketidakcukupan konsumsi pangan" merupakan kondisi persentase penduduk dengan konsumsi makanan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum energi untuk hidup sehat dan aktif sesuai umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. Lebih jauh, faktor yang mempengaruhi indikator ini mencakup kemiskinan, daya beli rumah tangga, pengetahuan gizi, ketersediaan pangan, pendapatan, dan sejumlah hal lainnya. Berbagai faktor ini diduga turut mempengaruhi atas ketidakcukupan konsumsi pangan, yang juga dapat dijelaskan pada Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Sultra pada tahun 2018 yang mencapai 135,353, menurun menjadi 106,425 pada tahun 2021 (BPS Sultra: 2023). Sementara itu, penjelasan logis terkait penerima KPS yang menurun tajam sebesar 26,5 persen poin adalah kian meningkatnya jumlah penduduk di tengah krisis Covid dan pasca Covid yang tidak mampu dijangkau melalui peningkatan KPS baik akibat tidak adanya peningkatan jumlah KPS maupun salah salur). Hal ini diperkuat oleh berbagai temuan audit BPK-RI PWK Sultra yang menunjukkan berbagai bantuan KPS yang salah salur di berbagai kabupaten (yang pada skala nasional angka salah salur disebut mencapai Rp185 miliar [CNN].

Bagaimana Intervensi Pemerintah dalam Menangani Masalah Ini (Dilema, Hambatan, dan Peluang)?

Dalam Upaya menurunkan angka *stunting*, Pemerintah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024. Selain itu, untuk menekan angka *stunting*, maka pemerintah berupaya "memerangi" *stunting* dengan turut memprioritaskan 12 daerah yang menjadi target utama program *stunting*, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu di antaranya. Karena besarnya perhatian *stunting* pemerintah, tak heran, BPK-RI juga turut mengevaluasi program tersebut melalui laporan pemeriksaan. Lebih jauh, Pemerintah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* menyinggung terkait Upaya dan strategi dalam memerangi *stunting* yang dilakukan melalui berbagai upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.

Dalam penjelasannya, intervensi spesifik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Contoh dari intervensi ini adalah pemberian makanan (yang juga memperhatikan pemenuhan asupan gizi dan nutrisi) bagi ibu hamil dari kelompok miskin, suplementasi tablet tambah darah, promosi (pengayaan dan penggalakan informasi) dan konseling menyusui, MPASI dan lain sebagainya. Sementara itu, intervensi sensitif kegiatan adalah yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Contoh dari tindakan ini adalah upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, penyediaan jaminan kesehatan, penyediaan jaminan bantuan sosial, pemenuhan ketahanan pangan keluarga miskin, dan sejenisnya. Melalui definisi dan contoh tersebut, pemerintah pusat secara jelas menunjukkan keseriusan dengan melibatkan multi-sektor dan multi-pihak agar dapat bekerja secara padu melalui kebijakan yang *integrative*.

Namun demikian, komitmen pemerintah pusat jelas perlu diikuti dengan keseriusan pemerintah daerah (khususnya Sulawesi Tenggara) dalam menerapkan strategi tersebut, serta mengevaluasi kekurangan dan keterlambatan *progress* penanganan *stunting* selama ini misal, meningkatkan penerima jumlah KPS dan juga tingkat keakuratan penyalurannya menurut data IKPS yang Pemprov Sultra gagal tangani. Karenanya, juga dibutuhkan sinkronisasi program antar-pihak agar tercapai tujuan dan kebijakan yang padu, efektif, dan efisien. Untuk menggenapi Upaya ini, maka pemerintah perlu penguatan dengan belajar dari kasus pengalaman negara lain maupun inefektivitas dari kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam berbagai penelitian, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis target yang menasar kelompok tertentu dapat mengurangi dan mengentaskan *stunting* (Mary: 2018). Hal ini dapat dicapai melalui pelibatan kelompok miskin dalam pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan

kebutuhan dasarnya melalui pertumbuhan produktivitas sektor tertentu (dalam hal ini, dapat berupa Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ni'mah dan Nadhiroh (2010) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara panjang badan lahir balita, riwayat ASI eksklusif, pendapatan keluarga, pendidikan ibu dan pengetahuan gizi ibu terhadap kejadian *stunting* pada balita.

Akan tetapi, hambatan yang kini dihadapi oleh berbagai pihak yang mengemban amanat untuk memerangi *stunting* adalah hadirnya berbagai data yang berbeda, yang juga berasal dari berbagai lembaga/badan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari penderita *stunting* yang berada pada laman Kemendagri yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018, penderita *stunting* di Provinsi Sultra mencapai 15 persen, dan pada tahun 2021 mencapai 18,5 persen. Sementara itu, data yang dirilis oleh Kemenkes melalui Laporan IKHS menyebutkan bahwa *stunting* pada 28,7 persen, dan pada tahun 2021 mencapai 27,7 persen. Selain itu, BPS juga merilis data terakhir *stunting* pada tahun 2018 mencapai 10,1 persen.

Perbedaan data ini dapat menimbulkan kebingungan dan polemik pada jajaran yang terlibat dalam menangani kasus *stunting*, yang berpotensi mengakibatkan kekeliruan dalam alokasi sumber daya, inefisiensi pemanfaatan sumber daya dan anggaran, dan pada akhirnya pemborosan anggaran. Padahal, dibutuhkan data yang menyeluruh, padu dan sinkron sebagai landasan dasar perumusan kebijakan. Karenanya, diperlukan satu data padu dan lengkap yang terintegrasi yang mampu mengarahkan berbagai jajaran yang terlibat terkait kondisi riil di lapangan, sehingga pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan program dan penganggaran secara tepat. Untuk melakukan hal ini, Kemenkes perlu mengambil *leading role*, dan jajaran kementerian/Lembaga lainnya perlu menyingkirkan ego sektoral. Mengingat, tercapainya tujuan penurunan *stunting* dapat berarti menjamin SDM Indonesia yang sehat, dan karenanya mendukung Indonesia yang lebih produktif dan sejahtera di waktu yang akan datang.



Laboratorium Forensik Digital BPK berhasil mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi



Belajar Budaya Kerja Inovatif dari



Budaya kerja berbasis inovasi dapat lahir dengan mendorong sumber daya manusia di organisasi untuk berkembang tanpa kekhawatiran atas kegagalan. Hal itu menjadi salah satu nilai yang dipercaya oleh Google dalam membangun budaya kerja sehingga kini mampu menjadi raksasa teknologi dunia.

Head of Government Affairs and Public Policy Google Cloud Indonesia Brigitta Ratih Aryanti membagikan kisah Google dalam membangun budaya kerja pada Rakor Pelaksana BPK Tahun 2024 yang mengusung tema "Membangun Budaya Kerja untuk BPK Semakin Berkinerja".

Brigitta menyampaikan, Google bukan hanya sekadar mesin pencari atau *search engine* seperti yang banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Google merupakan perusahaan yang tumbuh berkembang dan kini memiliki banyak anak perusahaan, produk, serta inovasi.

"Sebagai perusahaan global, visi kami adalah mengorganisasi atau mengatur informasi yang ada di seluruh dunia dan menjadikan informasi tersebut bisa diakses secara universal dan bermanfaat," ujar Brigitta.

Saat ini produk Google bukan sekadar *search engine* tapi ada juga Google Mail, Chrome, Google Maps, Youtube, Android, Google Playstore, Google Drive, dan lain-lain. Saat ini, dari delapan produk Google terdapat 1 miliar pengguna.

Brigitta menyampaikan, Google dimulai dari suatu proyek riset mahasiswa yakni *founder* Google yang kala itu berkuliah di Stanford University. Google awalnya adalah tugas kuliah mahasiswa pada 1995 dan kemudian berkembang sampai saat ini.

Google dikembangkan dengan menggunakan PC sederhana dan dimulai bahkan dari garasi rumah.

"Dengan mengusung budaya kerja yang didirikan sejak awal, Google bisa berkembang hingga memiliki 150 lebih pusat data yang tersebar di seluruh dunia dan mengelola sekitar 25 persen lalu lintas internet di seluruh dunia," ujarnya.

Selain mampu menghasilkan teknologi dan inovasi, salah satu yang dipandang dari Google adalah kemampuan menciptakan budaya kerja yang inovatif. Google menyadari kunci dari keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Brigitta menyampaikan, Google pun mengembangkan budaya kerja sehingga bisa diadopsi oleh 120 ribu karyawannya yang berasal dari 150 lebih negara dan memiliki latar belakang budaya berbeda. Dia menjelaskan, ada empat hal mendasar yang dilakukan oleh Google dalam mengembangkan budaya organisasi berbasis inovasi. Pertama adalah *curiosity* atau keingintahuan dan rasa penasaran. Kemudian, *agency* atau mengembangkan niat untuk melakukan sesuatu yang baik. Ketiga, mengembangkan kolaborasi. Keempat, adalah pengambilan risiko atau *risk taking*.

Curiosity dapat dibangun dengan mempertanyakan berbagai hal, bereksperimen sekaligus tetap mengusung jiwa *playful* atau jiwa eksploratif yang terinspirasi dari perilaku anak-anak.

"Di Google, hal itu dibuat dengan bagaimana kantor dirancang. *Feel* kantor Google di seluruh dunia itu sama, yaitu warna warni dan banyak makanan. Ini dinilai dapat memotivasi karyawan, semua karyawan tertarik dan semangat datang ke kantor," ujarnya

Dengan suasana kantor yang menarik itu pula diharapkan dapat mendorong pemikiran yang *out of the box*. Konsep kantor pun mengusung *open space* sehingga memungkinkan para karyawan bertemu dan bisa berdiskusi dengan karyawan lainnya.

"Sebagai perusahaan global, visi kami adalah mengorganisasi atau mengatur informasi yang ada di seluruh dunia dan menjadikan informasi tersebut bisa diakses secara universal dan bermanfaat."

Head of Government Affairs and Public Policy
Google Cloud Indonesia,
Brigitta Ratih Aryanti



Salah satu ciri khas Google yang kemudian berkembang adalah 'googleyness'. Ini adalah istilah internal yang menunjukkan karakter pekerja di Google yakni rendah hati, tapi dia punya rasa penasaran tinggi, punya kesadaran tinggi untuk berdampak pada sekitarnya, dan bisa bekerja dalam kondisi ambigu dan suka belajar.

Untuk mengembangkan *curiosity* di organisasi di luar Google, menurut Brigitta dapat dimulai dengan mengubah setting kantor. Membuat kantor menjadi lebih *fresh* dapat meningkatkan semangat karyawan untuk datang dan bekerja. Bisa pula diberikan tambahan seperti makanan gratis dan lainnya.

Kemudian, *agency* atau bagaimana karyawan bisa memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, inisiatif yang tinggi, dan bisa memecahkan masalah dengan baik.

Di Google, ungkap Brigitta, terdapat program 20% Project. Program itu

memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengembangkan diri secara profesional di luar bidang yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Dia mencontohkan, seorang pemeriksa di BPK bisa mengambil 20% Project karena punya ketertarikan di bidang SDM. Mengingat di divisi SDM terdapat proyek mengenai transformasi maka auditor bisa mengambil proyek tersebut.

"Ini menarik karena dari sisi karyawan dia memperoleh kesempatan untuk belajar hal baru serta mengembangkan jaringan baru," ujarnya.

Dari sisi perusahaan atau organisasi, justru bisa mendapatkan "tenaga kerja gratis" karena perusahaan tidak perlu meng-*outsource* suatu pekerjaan. "Perusahaan bisa memanfaatkan SDM internal yang ada dengan kualitas yang baik," ujarnya.

20% Project juga menjadi terobosan yang baik untuk memecah ego sektoral. Ini karena terjadi pertukaran pekerja antardepartemen.

"Cara menciptakan budaya *risk taking* adalah dengan memunculkan kebiasaan untuk memberikan penghargaan pada mereka yang berani mengambil risiko walau gagal. Terus menekankan untuk mencoba hal baru supaya karyawan berani mencoba."

Head of Government Affairs and Public Policy Google Cloud Indonesia, Brigitta Ratih Aryanti

Kemudian, dasar dari inovasi adalah kolaborasi. Google berupaya memastikan bahwa setiap anggota tim itu saling terhubung dan terjadi *sharing of information*.

Salah satu bentuk kolaborasi di Google disebut Googler to Googler (G2G). Brigitta menyampaikan, hal ini mirip dengan 20% Project. Misalnya, seorang karyawan punya ketertarikan untuk mengajar, atau berbagi ilmu ke tim lain maka dia bisa mendaftarkan diri ke G2G.

"Misalnya, saya saat ini berada di bidang kehumasan tapi saya bisa mengajar cara *public speaking* kepada tim lain yang ada di Google. Ini adalah bagian dari berbagi keterampilan sehingga dapat mengembangkan talenta secara internal," ujarnya.

Google juga mendorong karyawan dalam hal *risk taking* atau mengambil risiko. Jadi, bagaimana membuat karyawan mampu bermimpi besar, bereksperimen, dan mencoba memberikan yang terbaik.

"Kalau di Google kami punya istilah berpikir 10 kali. Bagaimana saya bisa membuat proses pekerjaan ini 10 kali lebih baik," ungkapnya.

Hal ini guna mendorong ambisi besar dari pekerjaan masing masing. Dari hal itu salah

satunya kemudian lahir Waymo, inovasi mobil tanpa supir yang dikembangkan Google.

Hal terpenting yang diterapkan di Google adalah karyawan punya kenyamanan untuk mengambil risiko karena ada rasa aman untuk mengalami kegagalan. Menurut Brigitta, hal ini memang sangat sulit diterapkan terutama dalam budaya kerja di Indonesia. Ini karena ketika seseorang gagal itu biasanya muncul tuduhan, dipersalahkan, dan lainnya sehingga seseorang memiliki kecenderungan untuk takut mencoba.

"Di Google, secara global kami memastikan bahwa setiap orang merasa aman untuk mengekspresikan diri dan akhirnya bisa berkreasi," ungkapnya.

Berdasarkan hasil studi, perasaan keamanan berinovasi itu kemudian berdampak pada kinerja perusahaan. Pendapatan penjualan bisa naik 17 persen pada tim yang merasa aman dibandingkan dengan tim yang merasa terancam dengan kegagalan.

"Cara menciptakan budaya *risk taking* adalah dengan memunculkan kebiasaan untuk memberikan penghargaan pada mereka yang berani mengambil risiko walau gagal. Terus menekankan untuk mencoba hal baru supaya karyawan berani mencoba," ujarnya.

Tingkatkan Kualitas Karya Ilmiah dengan Buku Panduan Terbaru



Kebutuhan terhadap penulisan artikel di jurnal ilmiah akreditasi (nasional) maupun terindeks bereputasi global (internasional) terus meningkat. Hal tersebut bahkan menjadi prasyarat pada berbagai profesi, antara lain peneliti, dosen, guru, penyuluh, perekayasa, pengembang teknologi pembelajaran, pengembang perbukuan, widyaiswara, perancang undang-undang, dan jabatan fungsional lainnya.

Bagi mahasiswa, menulis pada jurnal bereputasi merupakan prasyarat kelulusan. Di sisi lain, kualitas dan kuantitas jurnal ilmiah mengalami peningkatan yang signifikan. Jurnal ilmiah yang berstatus akreditasi (nasional) dan terindeks oleh lembaga bereputasi global (internasional) menerapkan seleksi naskah yang super ketat. Oleh karena itu, menulis artikel pada jurnal memerlukan kompetensi yang bergerak dinamis seiring perkembangan ilmu dan teknologi.

Buku ini dirancang untuk membantu para profesional dalam mempublikasikan karya tulisnya pada jurnal ilmiah bereputasi. Buku ini terdiri dari 11 bab yang disajikan dengan cukup padat dan sistematis sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan.

"Ciri utama karya tulis ilmiah adalah menyajikan hasil penelitian, pengembangan, atau kajian yang memiliki kebaruan (*novelty*) dalam memperkaya keilmuan atau memecahkan masalah yang bermanfaat bagi kehidupan."

Secara umum 11 bab tersebut membahas 3 topik utama, yaitu:

- 1) filosofi, makna, pemahaman, dan peran-peran jurnal dan karya tulis ilmiah (bab I sampai dengan bab III);
- 2) kiat-kiat publikasi dan strategi penulisan (bab IV sampai dengan bab VI);
- 3) praktik menulis (bab VII sampai dengan bab XI).

Filosofi, makna, pemahaman, dan peran-peran jurnal dan karya tulis ilmiah Topik ini disajikan pada 3 bab awal buku. Bab pertama membahas secara umum mengenai menulis dan jurnal ilmiah, termasuk didalamnya mengenai filosofi, manfaat, dan kendala dalam menulis.

Salah satu kata kunci yang bisa diambil dalam bab ini adalah terkait dengan *novelty* (kebaruan) dalam tulisan. Bab kedua memberikan pemahaman mengenai karya tulis ilmiah, bentuk publikasi ilmiah, dan indikator karya tulis ilmiah yang baik.

Ciri utama karya tulis ilmiah adalah menyajikan hasil penelitian, pengembangan, atau kajian yang memiliki kebaruan (*novelty*) dalam memperkaya keilmuan atau memecahkan masalah yang bermanfaat bagi kehidupan.

Artikel yang baik adalah artikel yang memiliki nilai guna, menginspirasi pembaca, mendorong perubahan perilaku pembaca terutama untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan.

Bab III antara lain membahas mengenai perkembangan jurnal ilmiah, gaya selingkung, penyuntingan, dan terkait plagiaris dan *similarity*.

Jurnal yang paling baik menurut buku ini adalah jurnal yang artikel-artikelnya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemecahan masalah-masalah kehidupan menuju peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Kiat-kiat publikasi dan strategi penulisan Bab IV sampai dengan bab VI buku ini membahas terkait dengan kiat-kiat publikasi pada jurnal ilmiah, bahasa dan etika penulisan karya tulis ilmiah, dan strategi menulis artikel. Bab IV menyajikan prinsip artikel dalam jurnal ilmiah, pemilihan jurnal yang tepat, penulisan sesuai dengan gaya selingkung, teknik sitasi, pengiriman naskah, respons atas hasil penyuntingan, dan juga kiat menulis pada jurnal internasional bereputasi. Kebaruan (*novelty*) kembali menjadi salah satu bahasan dalam bab ini.

Bab V berisi pembahasan mengenai bahasa dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Sesuai judulnya, dua hal yang menjadi topik utama dalam bab ini adalah terkait dengan bahasa dan etika. Informasi yang disajikan cukup lengkap dan disertai dengan contoh-contoh praktis yang dapat memberikan gambaran kepada pembacanya, mulai dari penulisan paragraf, penulisan kalimat, ejaan dan kata, dan juga terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran dalam publikasi ilmiah.

Bab VI dapat dikatakan sebagai bab utama buku ini. Selain karena merepresentasikan judul buku, bab ini menyajikan secara ringkas bagaimana strategi membuat karya tulis ilmiah, mulai dari pembahasan mengenai bahan tulisan sampai dengan tahapan menulis naskah artikel.

Salah satu hal pokok dalam bab ini adalah terkait dengan pemikiran bahwa persiapan menulis tidak cukup hanya dengan mengumpulkan bahan-bahan saja. Penyusunan kerangka penulisan hendaknya langsung disesuaikan dengan gaya selingkung dan sistematika penulisan jurnal yang dituju.

Tahapan selanjutnya dapat dilakukan dengan menulis *draft* cepat (*jotting*), *reviu* dan *revisi* naskah, baik dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, dan finalisasi.

Praktik menulis

Bagian ini terdiri atas lima bab yang dapat membantu memberikan gambaran mengenai penulisan artikel secara komprehensif. Walaupun pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa masing-masing jurnal memiliki sistematika tersendiri, bab VII sampai dengan bab XI buku ini menyajikan suatu sistematika penulisan general yang dapat disesuaikan dengan sistematika jurnal yang akan dituju.

Bagian ini dimulai dengan pembahasan mengenai penulisan bagian pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan penulisan simpulan dan daftar pustaka. Alur pembahasan dan penulisan pada lima bab terakhir ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memadai kepada pembaca.

Kesimpulan

Menulis pada prinsipnya sama yaitu menuangkan gagasan/pemikiran hasil, termasuk juga dalam menulis pada jurnal yang sejatinya hanya menuliskan temuan atau gagasan hasil penelitian/kajian. Buku ini memiliki sistematika penulisan yang cukup baik dan komprehensif sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk memulai menulis artikel secara lebih baik lagi. Contoh kasus yang disajikan dan dilengkapi dengan lampiran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi salah satu nilai tambah dari buku ini.

**“Orang boleh pandai setinggi langit,
tapi selama dia tak menulis,
ia akan hilang dalam masyarakat
dan dari sejarah.”**

(Pramoedy Ananta Toer, 1925-2006)

Tanpa mengurangi *added value* yang baik dari buku ini, akan lebih baik lagi jika bab VI dari buku ini dapat diperkaya dengan contoh yang lebih konkret karena bagian tersebut merupakan representasi dari judul buku. Selain itu, jika isi buku dapat di *cross reference* dengan contoh artikel jurnal hasil penelitian penulis, maka buku ini merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi pembaca.

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah” (Pramoedy Ananta Toer, 1925-2006).

Kutipan ini dicuplik dari bagian awal buku sebagai akhir resensi. Kutipan ini diharapkan dapat menggelitik pembacanya untuk memulai ataupun kembali menulis.



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**





Alamat:

Jl. Diponegoro
No. 1, Magelang



Buka:

Selasa - Minggu

09:00-15:00



(0293) 310230



museum.bpk.go.id



[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi di berbagai ruangan menarik



Hati-Hati dengan Sifat Pembuli dalam Diri

Employee Care Center Badan Pemeriksa Keuangan kali ini mengangkat tema terkait perundungan atau *bully*. Terkait perundungan, kadang kala dalam interaksi sehari-hari, bisa jadi apa yang kita anggap sebagai suatu yang bisa diterima orang dengan wajar, namun nyatanya hal tersebut diterima sebagai sesuatu yang negatif.

Misalnya, kita menyebut “*Ealah.. rajin bener di meja terus. Kayaknya. biar tambah disayang atasan nih, jadi kerjanya serius?*”. Pernyataan demikian termasuk sesuatu yang bersifat membuli walau kita tidak menyadarinya.

Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Faktanya, seperti contoh di atas, *bullying* bisa terjadi dimana-mana. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang terjadi berulang kali dari waktu ke waktu.



Tindakan *bullying* merupakan persoalan psikologis yang serius karena menimbulkan dampak destruktif seperti depresi yang besar pada korban sehingga bisa sampai pada keputusan untuk melakukan tindakan irasional seperti mengkonsumsi obat terlarang bahkan bunuh diri.

Yuk bersama-sama mengenali sifat-sifat yang merupakan tanda pembuli!

1. Mengkritik tanpa membangun

Menyampaikan kritik tanpa niat membantu atau membangun, itu bisa menjadi tanda sifat pembuli. Perhatikan apakah kritismu bersifat konstruktif atau hanya mengecam tanpa memberikan solusi.

2. Menyebar gosip atau fitnah

Menebar gosip atau fitnah tentang orang lain adalah tanda klasik sifat pembuli. Kebiasaan ini dapat merusak reputasi dan hubungan antar individu, menciptakan ketidaknyamanan dalam lingkungan sosial.

3. Sering menertawakan orang lain

Jika kamu sering tertawa atau mentertawakan kelemahan atau kesalahan orang lain dengan tendensi menghina atau merendahkan orang lain, itu bisa menjadi tanda sifat pembuli.

4. Sering menunjukkan dominasi

Sifat pembuli sering terlihat dalam perilaku dominan. Jika kamu cenderung mendominasi atau memaksa orang lain untuk tunduk pada keinginanmu, itu bisa jadi indikasi perilaku intimidatif.

5. Tidak sensitif terhadap perasaan orang lain

Sifat pembuli sering kali tidak peka terhadap perasaan orang lain. Jika anda sering mengabaikan atau meremehkan perasaan orang lain itu bisa menjadi pertanda bahwa kamu memiliki sifat pembuli yang perlu diatasi.



Setelah anda mengenali sifat-sifat pembuli, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakui dan menerima kesalahan. Dan untuk mengatasi sifat pembuli memerlukan komitmen yang kuat untuk perubahan dan pemahaman mendalam tentang akar masalah.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu mengatasi sifat pembuli.

1. Instropeksi diri

Luangkan waktu untuk berpikir secara mendalam. Identifikasi akar penyebab perilaku pembuli dalam diri anda.

2. Berpikir Empati

Mengembangkan empati membutuhkan usaha sadar untuk melihat dunia dari perspektif orang lain.

3. Berkonsultasi dengan profesional

Jika anda merasa sulit untuk mengatasi sifat pembuli secara mandiri, jangan ragu untuk menghubungi konselor atau psikolog.

"Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis."

Gotong Royong Membangun Yayasan Cakra Bhakti Santosa



▲
Dori Santosa

Yayasan Cakra Bhakti Santosa kini tengah berupaya mengembangkan sayap agar bisa menegaskan eksistensinya. Yayasan tersebut merupakan wadah berkumpulnya para pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tetap ingin memberikan kontribusi termasuk untuk memajukan institusi BPK sendiri.

Saat ini, pengurus baru Yayasan Cakra Bhakti Santosa telah dibentuk dengan dipimpin oleh Dori Santosa sebagai ketua. Seperti diketahui, Dori telah pensiun dari BPK per 1 Agustus 2023 dan terakhir menjabat sebagai pegawai eselon I BPK.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Dori mengisahkan, para senior pensiunan di BPK serta pengurus yayasan sebelumnya memberikan dukungan untuknya memimpin Yayasan Cakra Bhakti. Hal ini juga menjadi estafet kepemimpinan rutin yang dilakukan oleh yayasan.

"Saat ini, pensiunan sudah mencapai ribuan dan turut menjadi anggota dari Yayasan Cakra Bhakti," ungkap Dori.

Dori menyampaikan, pengurus yayasan saat ini turut didukung oleh mantan pimpinan BPK. Salah satunya yakni mantan wakil ketua BPK Bambang Triaji yang kini menjabat ketua dewan pembina yayasan.

Yayasan Cakra Bhakti Santosa telah dibentuk sejak 1988. Dori mengatakan, pembentukan yayasan saat itu bertujuan untuk mensejahterakan pegawai maupun pensiunan. Akan tetapi, menurut Dori, dengan berbagai siklus kepemimpinan dan juga kebijakan, gerak langkah yayasan turut mengalami naik dan turun.

Salah satu kegiatan yayasan adalah memiliki bidang usaha bernama PT Pentas Cakra Bhakti. Dori mengatakan, di era kepemimpinannya, ia berharap BPK secara kedinasan turut mendukung dan memiliki yayasan.

"Sehingga, yayasan ini bisa menjadi besar dan bisa eksis baik di dalam BPK maupun di luar lingkup BPK," ungkap Dori.

Dori menyampaikan, yayasan memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan kedinasan BPK. Bahkan, Dori sudah menjalin hubungan dengan sekretaris jenderal BPK agar bisa terlibat dalam kegiatan yayasan. Salah satunya dapat diwujudkan dengan mengangkat sekjen BPK sebagai salah satu pembina yayasan.

Selama ini, hasil dari kegiatan usaha yayasan telah memberikan manfaat kepada anggota seperti pemberian

santunan kepada pensiunan pada saat lebaran atau hari raya keagamaan. Ada pula pemberian santunan kepada anggota yayasan atau pensiunan yang meninggal dunia.

"Tapi memang waktu itu skalanya masih kecil sehingga kegiatannya terbatas pada kegiatan sosial. Ke depannya, apabila kita punya kemampuan maka kita bisa lakukan lebih dari itu," ujar Dori.

Dori menjelaskan, pada prinsipnya, siapa pun yang pensiun dari BPK bisa bergabung dalam kegiatan yayasan. Yayasan Cakra Bhakti juga memiliki komisariat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kegiatan yang dilakukan perwakilan komisariat juga rutin, ada arisan maupun pertemuan-pertemuan anggota," katanya.

Dori mengatakan, saat ini Yayasan Cakra Bhakti berupaya mengikuti jejak yayasan dari institusi lain yang sudah mapan. Yayasan di lembaga lain yang lebih mapan kini bahkan bisa mengelola hotel, sekolah, maupun rumah sakit.

"Kami sedang mencoba menuju ke sana, sehingga ke depan bisa mengembangkan usaha tidak hanya di lingkup BPK tapi bahkan ke luar. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota," ungkap Dori.

Fokus kegiatan yayasan saat ini, ujar Dori, adalah mewujudkan pendirian lembaga pendidikan yang menunjang kebutuhan kedinasan BPK. Dia mencontohkan, kegiatan sertifikasi pemeriksa BPK dapat melibatkan yayasan di dalamnya.

"Yayasan bisa memberikan kursus atau pelatihan untuk proses sertifikasinya. Sehingga, lini usaha yang dikembangkan tetap sejalan dengan kegiatan BPK."

Dori Santosa

"Yayasan bisa memberikan kursus atau pelatihan untuk proses sertifikasinya. Sehingga, lini usaha yang dikembangkan tetap sejalan dengan kegiatan BPK," ujar Dori.

Peluang lainnya, kata Dori, adalah dengan mendukung posisi BPK yang kini menjadi Ketua INTOSAI. Dia mengatakan, yayasan bisa ikut andil dalam berbagai kegiatan menuju kongres puncak INTOSAI nantinya.

"Yayasan bisa menyediakan layanan *event organizer*, tentunya dengan kemampuan yang harus mumpuni," ujarnya.

Dori juga menjalin hubungan koordinasi dengan Koperasi Pegawai BPK. Menurutnya, PT Pentas sebagai motor lini usaha yayasan perlu bisa berjalan beriringan dengan koperasi.

"Kita tekankan untuk bisa bersinergi, tidak perlu bersaing tapi kita ingin sama-sama maju," ungkapnya.

Dori menekankan ingin memberikan warna berbeda dalam kepemimpinannya di yayasan. Dia menjelaskan, apabila dulu pimpinan itu baru melirik atau menyadari kegiatan yayasan setelah mereka pensiun. kini ia ingin menjalin koordinasi intens dengan pimpinan yang masih aktif berdinamis.

"Tentunya ini menekankan bahwa yayasan ini adalah milik kita bersama," ujarnya.

Yayasan pun mencoba mendekati diri dengan para pegawai salah satunya melalui *Warta Pemeriksa*. Melalui media tersebut, yayasan ingin mengabarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun di level komisariat.

"Saya tentu berharap yayasan ini bisa besar. Ini juga menjadi semangat saya mau menerima kepercayaan menjadi ketua yayasan," kata Dori.

Mengaudit Pemanfaatan Teknologi



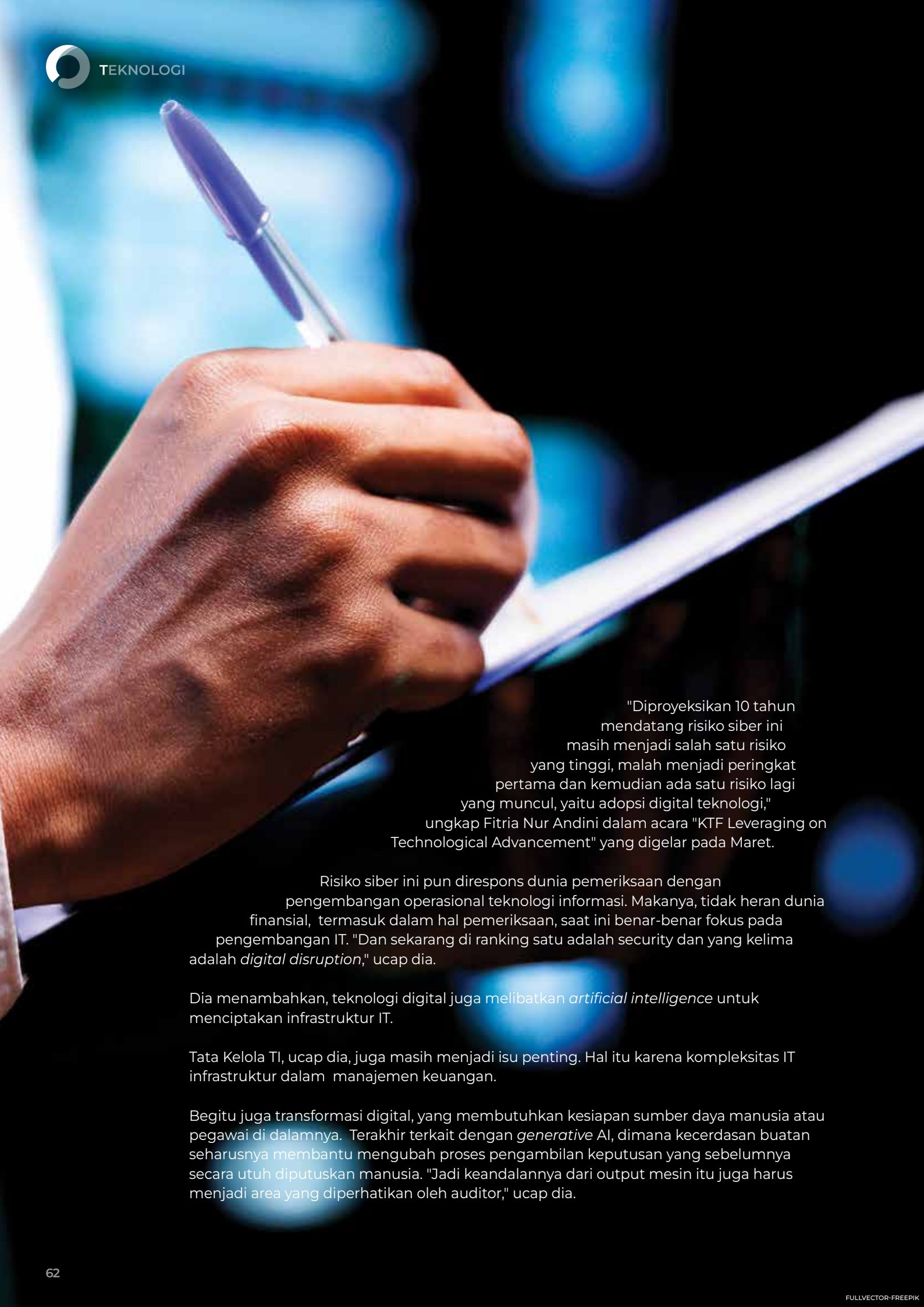
◀
Fitria Nur Andini

Badan Pemeriksa Keuangan sejak awal 2020 menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12. Lewat ISSAI 12, lembaga pemeriksa didorong untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah maupun sektor publik. Pemeriksaan atau audit terhadap pemanfaatan teknologi menjadi salah satu hal yang penting dilakukan guna menunjang tujuan tersebut.

BPK diharapkan mampu mengikuti perkembangan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan. Dalam hal ini, menurut Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi Biro Teknologi Informasi BPK, Fitria Nur Andini, adalah terkait teknologi.

Ia menyatakan teknologi berperan penting dalam proses pemerintahan. Berdasarkan survei Protiviti, risiko yang dialami organisasi ke depan juga terkait teknologi. Risiko IT tersebut seperti ancaman siber dan *existing operation and legacy*.

Existing operation menjadi hal yang familiar karena ada aktivitas operasional IT dan juga pengembangan-pengembangan infrastruktur, misalnya aplikasi atau sistem informasi.



"Diproyeksikan 10 tahun mendatang risiko siber ini masih menjadi salah satu risiko yang tinggi, malah menjadi peringkat pertama dan kemudian ada satu risiko lagi yang muncul, yaitu adopsi digital teknologi," ungkap Fitria Nur Andini dalam acara "KTF Leveraging on Technological Advancement" yang digelar pada Maret.

Risiko siber ini pun direspons dunia pemeriksaan dengan pengembangan operasional teknologi informasi. Makanya, tidak heran dunia finansial, termasuk dalam hal pemeriksaan, saat ini benar-benar fokus pada pengembangan IT. "Dan sekarang di ranking satu adalah security dan yang kelima adalah *digital disruption*," ucap dia.

Dia menambahkan, teknologi digital juga melibatkan *artificial intelligence* untuk menciptakan infrastruktur IT.

Tata Kelola TI, ucap dia, juga masih menjadi isu penting. Hal itu karena kompleksitas IT infrastruktur dalam manajemen keuangan.

Begitu juga transformasi digital, yang membutuhkan kesiapan sumber daya manusia atau pegawai di dalamnya. Terakhir terkait dengan *generative AI*, dimana kecerdasan buatan seharusnya membantu mengubah proses pengambilan keputusan yang sebelumnya secara utuh diputuskan manusia. "Jadi keandalannya dari output mesin itu juga harus menjadi area yang diperhatikan oleh auditor," ucap dia.

Kebijakan terkait transformasi

Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi Biro Teknologi Informasi BPK Fauzan Wahyuabdi Pratama mengatakan, pemerintah sudah menyusun berbagai kebijakan terkait dengan transformasi teknologi. Seperti Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selanjutnya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Transformasi Teknologi juga jadi bagian penting Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari ide transformasi digital, beberapa institusi, kementerian atau lembaga juga sudah menyusun beberapa kebijakan, baik yang bersifat umum maupun sektoral. Umumnya yang bisa menjadi acuan adalah Visi Indonesia Digital 2045 dari Kementerian Kominfo, rencana induk pengembangan industri digital Indonesia 2023-2045, dan strategi nasional kecerdasan *artificial* Indonesia 2020-2045 dari BPPT.

Regulasi dan kebijakan di atas adalah bagian dari *external environment* BPK yang perlu diperhatikan dan direspon sebagai sebuah perkembangan teknologi di Indonesia.

Penerapan di BPK

Selama ini BPK telah menggunakan dua jenis teknologi, yaitu *traditional technology* dan *emerging technology*. *Traditional technology* mungkin telah dikenal berdasarkan interaksi yang sudah digunakan seperti basis data, aplikasi, sistem informasi dan lain-lain. Sementara *emerging technology* adalah AI, *blockchain*, RPA, dan lain-lain.

"Nah teknologi-teknologi ini pun kemudian diadopsi oleh pemerintah di lingkungan auditee kita yang kerap kita temui juga di lingkungan kita, misalnya aplikasi pelaporan terintegrasi seperti SAKTI, SPAN untuk teman-teman di pusat, lalu di daerah ada SIMDA, SIPD, dan sebagainya," ucap dia.

Fauzan menambahkan, ada beberapa ruang lingkup atau sasaran dari teknologi audit. Pertama, ucap Fauzan adalah IT *governance*. Tata kelola TI adalah kerangka dasar bagaimana teknologi informasi ini dikelola oleh *top management*, sehingga menjadi landasan dan panduan tentang operasionalisasi TI di suatu organisasi atau lembaga.

"IT *governance* ini relevansinya adalah sistem IT bisa mendukung pencapaian organisasi sesuai dengan strategi organisasi," ucap dia.

Kemudian bidang kedua adalah *system acquisition and development*, dimana pembelian atau pengadaan sistem ini kerap dilakukan audit. Misalnya ada pengadaan aplikasi, pengadaan pengembangan sistem, dan dalam pemeriksaan *system acquisition* pada umumnya auditor akan berfokus pada *system development life cycle* (SDLC) *method*.

"Temuan audit seringkali menyoroti masalah dalam tata kelola TI, perencanaan infrastruktur TI, serta kebijakan dan regulasi terkait transformasi digital. Keamanan informasi, dimana masalah keamanan informasi juga menjadi perhatian utama dalam audit teknologi."

Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi Biro Teknologi Informasi BPK, Fitria Nur Andini

Kemudian, operasional IT sebagai salah satu yang menjadi obyek audit berikutnya, dimana yang menjadi acuan adalah *key performance indicator* atau *service level agreement*. Ini adalah operasionalisasi TI baik yang dilakukan secara *in house* maupun *third party*, yang mana *service level agreement* sudah ditentukan.

Selanjutnya adalah teknologi *outsourcing* yang menjadi bagian teknologi audit. Praktik untuk mengalihdayakan operasionalisasi TI yang sebelumnya dilakukan secara internal atau *inhouse* dengan memberikan kepada pihak luar atau pihak ketiga.

Berikutnya ada *business continuity management* atau keberlangsungan bisnis. Ini terkait dengan kemampuan organisasi untuk tetap beroperasi ketika ada disrupsi atau ketika ada insiden.

Contoh lainnya adalah keamanan informasi, termasuk perlindungan sistem informasi dari akses, penggunaan, atau kebocoran informasi yang tidak seharusnya, atau modifikasi kerusakan terhadap data. "Yang menjadi kunci dalam *information security* adalah *confidentiality*, *integrity* dan *availability* atau CIA terkait dengan kerahasiaan data, integritas atau keandalan data, dan juga terkait dengan ketersediaan data, ketersediaan sistem untuk menunjang proses bisnis," ucap dia.

Fokus utama SAI

SAI, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, telah secara aktif melakukan audit terhadap berbagai aspek teknologi. Fokus utama audit ini meliputi transformasi digital. Hal ini tercermin dari pemeriksaan terhadap entitas pemerintah yang memimpin dalam bidang teknologi informasi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Temuan audit seringkali menyoroti masalah dalam tata kelola TI, perencanaan infrastruktur TI, serta kebijakan dan regulasi terkait transformasi digital. Keamanan informasi, dimana masalah keamanan informasi juga menjadi perhatian utama dalam audit teknologi. SAI sering mengaudit infrastruktur keamanan informasi entitas publik, termasuk infrastruktur penyiaran digital di lembaga penyiaran publik.

Tidak hanya melakukan audit terhadap teknologi, SAI juga semakin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas audit mereka. Beberapa pemanfaatan teknologi yang umum digunakan adalah analisis data dengan berbagai perangkat lunak seperti Excel, ACL, dan SQL digunakan untuk menganalisis data audit. SAI juga mulai mengadopsi teknologi lanjutan seperti analisis data berbasis kecerdasan buatan dan *machine learning*.



Visualisasi data juga dilakukan SAI. Aplikasi seperti Power BI dan Tableau digunakan untuk menyajikan informasi audit dalam bentuk *dashboard* dan grafik yang mudah dimengerti.

SAI juga merespons tren big data dengan mengembangkan kapabilitas analitiknya untuk mengatasi volume data yang semakin besar. Dalam hal ini, BPK telah mengembangkan Big Data Analytics.

Berikutnya, pemanfaatan drone dan GIS (Sistem Informasi Geografis) digunakan untuk melakukan audit di lokasi yang sulit dijangkau atau luas.

Untuk menghadapi tantangan dalam audit teknologi, SAI perlu membangun strategi dan kapasitas yang tepat. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Strategi transformasi digital

SAI perlu merancang strategi transformasi digital yang mencakup aspek strategis, organisasi, proses, serta teknologi untuk menjawab perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan teknologi.

2. Kapasitas profesional dan organisasi

SAI harus membangun kapasitas auditornya dalam mengadopsi teknologi, termasuk dengan menyediakan pelatihan dan mengembangkan metodologi audit yang sesuai. Selain itu, kapasitas organisasi secara keseluruhan juga perlu ditingkatkan, mulai dari kepemimpinan hingga manajemen sumber daya.

3. Pengembangan kerangka kerja dan perencanaan strategis SAI perlu mengembangkan kerangka kerja dan perencanaan strategis untuk audit teknologi, seperti Strategic Audit Planning for Technology Audits (SAPTA), yang memungkinkan pengelolaan sumber daya yang optimal dan strategi audit yang efektif.

BPK Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas Alokasi dan Pelaksanaan APBN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diikuti dengan kualitas pencapaian hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua BPK Isma Yatun dalam kegiatan *entry meeting* pemeriksaan LKPP tahun 2023 di kantor pusat BPK pada Kamis (28/3/2024). Pada kesempatan itu, BPK juga menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (*unaudited*).

Entry meeting dihadiri para Anggota BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar



akuntansi pemerintahan. Kemudian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kecukupan pengungkapan.

"Untuk memberikan keyakinan memadai, BPK akan melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko, yang didukung dengan pemanfaatan *big data analytic*. Hasil pemeriksaan LKPP, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara," kata Isma Yatun.

Dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko, BPK mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

"Hasil pemeriksaan LKPP, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara."

Ketua BPK, Isma Yatun



sebelumnya, lalu hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan BPK pada tahun 2023 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2023.

Kemudian berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Mulai dari pembentukan bagian anggaran atau entitas pelaporan baru pada tahun 2023 serta penerapan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran sebagai pengganti mekanisme penggunaan bank garansi.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan, BPK akan memfokuskan beberapa hal dalam pemeriksaan LKPP tahun 2023. Mulai dari belanja negara, pendapatan negara, investasi pemerintah, dan utang pemerintah.

Dia pun berharap jajaran pemerintah memberi dukungan optimal dalam penyediaan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Dengan begitu pemeriksaan LKPP tahun 2023 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Daniel menambahkan, informasi keuangan yang disajikan perlu dilengkapi dengan informasi capaian kinerja pemerintah. Khususnya yang menggambarkan sejauh mana dana APBN dapat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

"Untuk itu, penting bagi pemerintah segera mendesain infrastruktur atau *support system* yang memadai untuk mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan dengan pelaporan informasi kinerja pemerintah," kata dia.

Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan komitmen, apresiasi, dan harapan agar komunikasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus dipertahankan. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK dan memonitor perkembangannya agar secara komprehensif dapat menyelesaikan poin permasalahan.

Pimpin *Entry Meeting*, Anggota VI BPK Tekankan Penguatan Keuangan Daerah



▲
Entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dan koordinasi pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD tahun 2023 dengan entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK.

Pemerintah pusat melalui bendahara umum negara (BUN) telah merealisasikan dana transfer ke daerah (TKDD) senilai Rp873,85 triliun pada tahun 2023. Terkait dengan itu, penguatan keuangan daerah perlu mendapat perhatian yang serius.

"Pemerintah daerah perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban TKDD dan alokasi belanja K/L yang dialokasikan kepada pemda tersebut agar akuntabel, tepat sesuai peruntukan, dan berkualitas," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilang.

Hal tersebut disampaikan pada saat memimpin kegiatan *entry meeting* pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, di kantor pusat BPK pada Jumat (8/3/2024). Selain *entry meeting*, BPK

juga melaksanakan koordinasi pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD tahun 2023 dengan entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK.

Acara tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI BPK Laode Nusriadi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti, Plt Kepala BPOM L Rizka Andalusia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufroon Mukti, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro, dan para gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi entitas pemeriksaan di lingkungan AKN VI.

Menurut Pius, saat ini pengelolaan keuangan negara/daerah, termasuk penyusunan LKKL dan LKPD, telah memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi ini memerlukan kompetensi personal yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih ketat.

"Sebagaimana konsep *garbage in, garbage out*, maka keandalan dari data/informasi yang dihasilkan suatu aplikasi ditentukan oleh kualitas dari input dan proses yang andal. Oleh karena itu, saya berharap agar pimpinan K/L dan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya yang cukup, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pendampingan teknis pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan," kata dia.

Untuk kelancaran pemeriksaan, Pius pun meminta komitmen pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah untuk dapat menyediakan *database* yang dikelola. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan



▲
Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara/Anggota VI
BPK RI, Pius Lustrilanang

anggaran dan pelaporan keuangan hingga aplikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Dia juga mengingatkan kepada para pemeriksa untuk selalu berpegang kepada nilai-nilai dasar BPK dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu independen, integritas, dan profesional. Kemudian juga menegakkan kode etik BPK dan standar pemeriksaan keuangan negara.

Sementara itu, Tortama VI Laode Nusriadi memaparkan bahwa di tingkat K/L terdapat alokasi anggaran belanja yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karenanya, perlu ada koordinasi antara K/L dan pemerintah daerah terkait, serta antara pemeriksa LKKL dan pemeriksa LKPD.

Dia pun menjelaskan mengenai pemeriksaan laporan keuangan BLU/BLUD dan LK BUMD oleh kantor akuntan publik (KAP). Dijelaskan, berdasarkan ketentuan, pemeriksa LKKL dan LKPD akan berkoordinasi dengan KAP dengan mengacu pada standar audit (SA) 600. Khususnya untuk mengidentifikasi isu-isu signifikan di LK BLU yang berdampak kepada penyajian LKKL serta isu-isu signifikan di LK BLUD dan LK BUMD yang berdampak kepada penyajian LKPD.

Sikap Mental yang Harus Dimiliki Pemeriksa BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bermanfaat



Feric Fernanda
Pemeriksa Muda, AKN I, BPK RI

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

Renstra BPK 2020–2024 menyatakan bahwa tujuan BPK adalah meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara. Strategi utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Harapan perbaikan atas kondisi yang masih perlu mendapat perhatian, diantaranya:

1. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
3. Pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan.

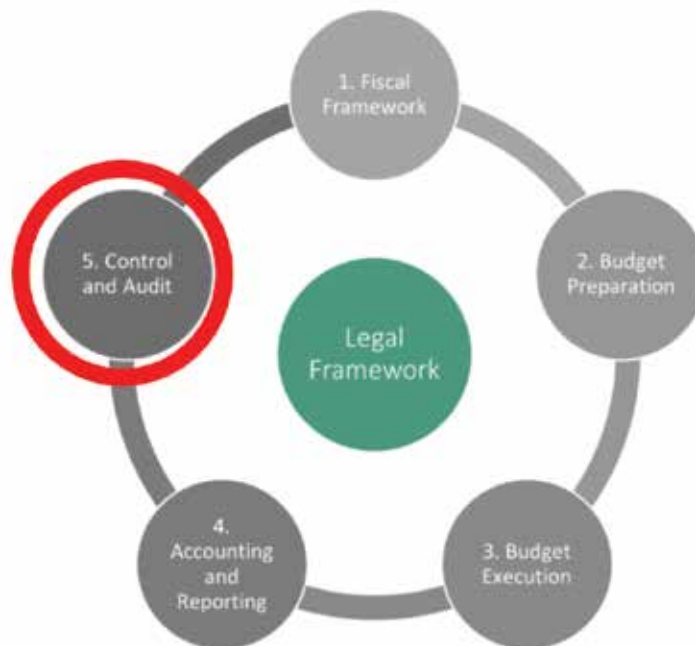
Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, profesionalisme ditegakkan sebagai semangat moral pegawai untuk tercapainya Tujuan BPK. Independensi menjaga pemeriksaan bebas dalam sikap dan penampilan dari pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi. Integritas mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Profesionalisme menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar BPK diperlukan sikap mental yang harus dimiliki pemeriksa untuk mendukung terwujudnya harapan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sikap mental adalah hal-hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Sikap mental yang baik adalah faktor sangat penting memastikan tercapainya tujuan suatu usaha. (Udoyono, 2022). Pemeriksa harus memiliki sikap mental *pride*, *mindfulness*, dan *joy* sebagai penyokong strategi peningkatan kualitas pemeriksaan pada renstra BPK yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan negara. Tulisan ini membahas penjelasan mengenai sikap mental tersebut dan harapan agar pemeriksa dapat menerapkan sikap mental dimaksud.

Kebanggaan (*Pride*) Menjadi Pemeriksa

Pride dalam sebuah organisasi merupakan hasil dari persepsi spesifik pada organisasi dan dari pengalaman dengan organisasi (Gouthier, 2011). Pegawai dengan *pride* tinggi merasa organisasi itu penting, berarti, mengesankan dan bagian bermanfaat pada komunitas. *Pride* sebagai kebanggaan terhadap diri sendiri, kelompok, atau pencapaian yang merujuk pada harga diri, kehormatan, atau rasa memiliki. Kehormatan diri atau kelompok tidak terpengaruh oleh situasi, godaan, tekanan dan pengaruh lainnya. *Pride* tercipta saat memahami dampak dari karya individu atau kelompok di atas faktor pengaruh yang menghalangi manfaatnya. Dengan demikian, *pride* berkaitan erat dan dapat menjadi sikap mental yang mendukung nilai dasar integritas dan independensi.

Pemeriksaan keuangan negara merupakan siklus dari Pengelolaan Keuangan Publik. Siklus pengelolaan keuangan publik dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan lalu dilanjutkan dengan audit oleh BPK (Gambar 1). Kesimpulan dan rekomendasi hasil audit BPK ditindaklanjuti sebagai perbaikan tahapan perencanaan hingga pelaporan periode berikutnya dari waktu ke waktu. Jadi, dalam siklus ini, peran BPK sangat strategis untuk membawa dampak perbaikan melalui pemeriksaan yang berkualitas.



Gambar 1. Posisi BPK dalam Siklus Pengelolaan Keuangan Publik

Sumber: Public Financial Management course IMF EdX

BPK sebagai Supreme Audit Institution di Indonesia memegang prinsip INTOSAI P- 12 "*The Value and Benefits of SAIs, making a difference to the lives of citizens*" yang sejalan dengan tujuan BPK untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik menjadi "*why*" bagi individu pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Terciptanya perbaikan tata kelola keuangan publik melalui pemeriksaan adalah pendorong "*why*" agar pemeriksa BPK menggali potensi terbaik dan menggunakan segenap kemampuannya (Sinek, 2009).

Keyakinan bahwa peran dan karya yang dihasilkan berpengaruh untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara menjadi *goal-driven* bagi pemeriksa dalam menunaikan tugasnya. Kebanggaan timbul bagi pemeriksa BPK karena turut berperan aktif dalam pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesungguhan (*Mindfulness*) Menunaikan Tugas

Mindfulness adalah kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya, sadar apa yang kita lakukan, dan tidak terlalu kewalahan oleh apa yang terjadi di sekitar (Russel, 2017). Pemeriksa yang memiliki sikap *mindfulness* akan menunaikan dengan kesungguhan setiap tugas yang diamanahkan kepadanya. Makna surat tugas adalah berpindahnya tanggung jawab kesimpulan, tujuan pemeriksaan, hal pokok pemeriksaan kepada tim pemeriksa. Tanggung jawab yang mulia tersebut dapat ditunaikan dengan kesungguhan meninggalkan segala hal yang membelokkan arah atas kesimpulan pemeriksaan. *Mindfulness* adalah bentuk sikap mental yang dapat mendukung nilai dasar independensi dan profesionalisme.

Pemeriksa harus menyadari atas risiko utama pemeriksaan yaitu salah membuat kesimpulan. Pemeriksa memitigasi risiko pemeriksaan dengan menggunakan respons yang tepat sehingga terhindar dari perumusan kesimpulan yang keliru. Risiko tersebut disikapi dan diantisipasi oleh pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan, sebagaimana terlihat pada tabel 1.

"*Pride* tercipta saat memahami dampak dari karya individu atau kelompok di atas faktor pengaruh yang menghalangi manfaatnya. Dengan demikian, *pride* berkaitan erat dan dapat menjadi sikap mental yang mendukung nilai dasar integritas dan independensi."

Tabel 1. Risiko Kesalahan Kesimpulan Pemeriksaan dan Antisipasi Pencegahannya

Risiko Pemeriksaan	Sikap dan Antisipasi
Tidak kunjung memperoleh bukti audit	Pembatasan Lingkup
Salah membaca risiko dan <i>sampling</i> tidak tepat.	<i>Risk Based Audit</i> & Pemahaman Proses Bisnis
Merujuk pada bukti audit rekayasa	Profesional Skeptisisme
Kurang cakap dalam analisa dan evaluasi	Kemampuan Kolektif, Peningkatan Kompetensi
Kesimpulan prematur. bukti belum cukup	<i>Critically Evaluated</i>
Kompromi dengan pihak yang diperiksa	<i>Integrity & Independency</i>

Sumber: ISSAI 4000

Hasil pemeriksaan berupa kesimpulan tepat dalam setiap tugas pemeriksaan membutuhkan upaya maksimal yang harus dijaga dan ditingkatkan. Pemeriksa bertanggung jawab mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan dan mendapatkan bukti audit yang cukup dan sesuai, (ISSAI 400). Dengan sikap dan antisipasi tersebut diharapkan pemeriksa berhasil memperoleh *the truth* yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Pemeriksaan *mindful* suatu keutuhan dalam tim pemeriksa didukung arahan pengendali teknis dan penanggungjawab pemeriksaan.

Pemeriksa secara terus menerus menyiapkan diri terhindar kesimpulan yang keliru karena tidak diperolehnya bukti, bukti yang tidak handal, ketidakcakapan mengevaluasi bukti dan merumuskan kesimpulan, maupun kesengajaan tidak mengungkapkannya. Kesungguhan menjalankan tanggung jawab atas tugas pemeriksaan, akan membentuk tim pemeriksa memiliki jargon “pantang pulang tanpa kesimpulan yang tepat”.

Kegemaran (*Joy*) Melaksanakan Pemeriksaan

Joy di tempat kerja berarti menggunakan sumber daya secara bijaksana untuk menangani tantangan yang dihadapi (Pryce-Jones, 2010). Pemeriksa yang memiliki *joy* selama pemeriksaan, menikmati waktu demi waktu dalam pelaksanaan tugasnya. *Joy* akan muncul apabila pemeriksa mengetahui apa yang dikerjakan dan menguasai cara mengerjakannya. *Joy* adalah bentuk sikap mental yang dapat mendukung nilai dasar profesionalisme.

Pemeriksa yang *joy* secara sukarela dan sukacita akan meningkatkan dan memadankan kompetensi dengan strategi dan tujuan BPK. Pemeriksa bekerja keras melatih *upgrade skill* dan *stay relevant* karena menyadari sepenuhnya bahwa tidak meningkatkan pengetahuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik. Pemeriksa dengan kesadaran sendiri memahami, merawat dan memperbaharui konsep-konsep terkait keuangan negara, kualitas *hardskill* dan *softskill* melalui diklat, sertifikasi dan media pembelajaran yang melimpah. Pemeriksa bekerja keras melatih diri saat tidak memeriksa, seperti atlet bercucuran keringatnya justru saat latihan. Selain itu pemeriksa perlu menajamkan *skill* melalui *tacit knowledge* dengan mencermati pengalaman keberhasilan dan kesalahan pemeriksa sebelumnya.

Pemeriksa butuh totalitas dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pengumpulan, analisis bukti audit dan perumusan kesimpulan adalah *skillset* yang dimiliki pemeriksa secara individu maupun kolektif. Pemeriksa menegaskan bahwa hubungan pemeriksa dengan pihak yang bertanggungjawab atas hal pokok selama masa pemeriksaan hanya menyampaikan dokumen dan memberikan keterangan yang benar. Pemeriksa mengandalkan keuletan pemerolehan bukti dan evaluasi bukti, bukan menargetkan nilai temuan, sehingga tim objektif sejak dari pikiran. Temuan (*proof*) dihasilkan berupa kebenaran utuh yang tidak subjektif dan dipaksakan, dibangun dengan bukti (*evident*) yang tidak dapat terbantahkan. Hasil pemeriksaan signifikan akan terungkap berkat keuletan dan kecakapan dalam tahap pelaksanaan.

Perpaduan kerja individu yang *joy* dalam bekerja melalui komunikasi antar tim dan dengan entitas menjadi *success factor* selama pelaksanaan pemeriksaan. Penanggung jawab, pengendali teknis, ketua dan anggota tim saling berpikir melayani satu sama lain sehingga tercipta kondisi *understanding*. Komunikasi tim dibangun melalui diskusi hari demi hari menghasilkan analisa yang matang, pengujian yang dalam danantisipasi hambatan pengujian. Komunikasi eksternal menjadi pembeda mutu hasil pemeriksaan yang diungkap. Pemeriksa meraih rispek melalui perlakuan pihak entitas dengan rispek, namun tegas terhadap pihak yang dirispek atas permintaan keterangan dan data pemeriksaan. Temuan pemeriksaan dan rencana tindak lanjut dijelaskan dan didiskusikan secara konkrit, sehingga pihak terperiksa akan menganggap hasil temuan kita sebagai obat yang diterima sebagai perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Sikap Mental Sebagai Pendukung Nilai-nilai Dasar BPK

Kebanggaan (*pride*) pemeriksa, membentuk kesungguhan (*mindfulness*) dalam penugasan, berujung pada sikap kegemaran (*joy*) dalam menjalankan detail teknis pekerjaan yang dijalankan. Sikap mental ini memberi manfaat untuk kehidupan orang lain menjadikan pemeriksa mencapai *self-fulfillment* dalam menjalankan profesinya. *Self-Fulfillment* merupakan proses pengembangan diri dan pemenuhan kemampuan dan sikap pribadi yang signifikan terhadap dunia dan diri sendiri (Shutenko, 2015).

Independensi, Integritas dan Profesionalisme yang telah ditetapkan menjadi nilai dasar BPK sebagai nafas organisasi yang harus dijadikan landasan bagi pemeriksa dalam melakukan penugasannya. Setiap individu pemeriksa berkesempatan menggali potensi terbaik untuk menghadirkan kontribusi manfaat sebanyak mungkin. Nilai-nilai dasar tersebut perlu dipompa terus menerus melalui sikap mental *pride*, *mindfulness* dan *joy* yang dimiliki individu dalam menunaikan tugas dan menjalankan pemeriksaan. Renstra BPK 2020-2024 belum menetapkan sikap mental yang harus dimiliki pegawai sebagai pendukung penerapan nilai-nilai dasar BPK. Penulis berpendapat nilai-nilai dasar tersebut perlu dimaksimalkan penerapannya melalui dukungan dari sikap mental yang dimiliki oleh pemeriksa BPK.

Penutup

Pemeriksa BPK hadir demi tata kelola keuangan publik yang lebih baik dengan menjunjung nilai-nilai dasar independensi, integritas dan profesionalisme sebagai landasan moral. Perwujudan nilai dasar tersebut perlu didukung dengan adanya sikap mental positif berupa *pride*, *mindfulness* dan *joy*. Pemeriksa dengan sikap mental tersebut adalah pemeriksa yang memahami dampak manfaat dari karyanya, menunaikan setiap tugas dengan kesungguhan dan menikmati waktu demi waktu dalam pelaksanaan tugasnya. Sikap mental tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh organisasi dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra BPK 2025-2029.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan (2018), Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (2020), Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Gouthier, M. (2011), *Organizational Pride and its Positive Effects on Employee Behavior*. *Journal of Service Management*, 22 (5):633-649.

INTOSAI (2010), ISSAI 4000: *Compliance Audit Guidelines*.

INTOSAI (2013), *INTOSAI Principles*.

Pryce-Jones, J. (2010), *Happiness at Work: Maximizing Your Psychological Capital for Success*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Russel, T. (2017), *What Is Mindfulness*. London: Watkins Publishing.

Sinek, S. (2009), *Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action*. New York: Portfolio/Penguin

Shutenko, E. (2015). *Motivational and Conceptual Aspects of Self-fulfillment*. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 214, 325–331.

Udoyono, B. (2022), *Arti Penting Sikap Mental*. Indonesiana.id.



Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.





1-9 Tarhib Ramadan bersama Ustaz Subkhi Al Bughary dihadiri Ketua BPK Isma Yaton dan Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo, 5 Maret 2024.



10



11



12



13



14



15

10-15 Ketua BPK Isma Yatun menghadiri acara Buka Puasa Bersama di Lingkungan AKN III BPK RI, 20 Maret 2024.



16-21 Peresmian Klinik Pratama Menara MTH 24 oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 27 Maret 2024.



22



23



24



25



26



27

22-24 Penyerahan LHP Kinerja dan PDDT Prov Jakarta oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 27 Maret 2024.

25-27 Penyerahan LHP Pelindo oleh Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo, 19 Maret 2024.



KUIS

Pada Majalah *Warta Pemeriksa* edisi Februari 2024 disebutkan bahwa Perpustakaan BPK menginisiasi suatu wadah teman belajar yang menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Apakah nama program tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Pengamanan *Password*

* Gunakan *password* yang kuat
Panjang *password* minimal 8 karakter.

* Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.



* Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

* Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan Password

* Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

* Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.
Contoh: menggunakan *password* yang berbeda untuk medsos dan akun BPK.

* Tidak menuliskan *password* di kertas/ media lain yang terlihat dengan mudah.

* Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id



Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa Ramadhan
1445 H

— & —
Hari Paskah



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official @humasbpkri.official



@bpk.ri



wartapemeriksa.bpk.go.id